



# REKOMENDASI PANITIA KERJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2016

Sumber Daya Manusia Indonesia  
di Era Regionalisasi Ekonomi Kawasan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Tahun 2016

---

© Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI 2016

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/ internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen negara lain.

Lebih lanjut lihat [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional  
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara III Lantai 6  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Indonesia  
Telepon +62 21 5175842, +62 21 5715210  
Faks +62 21 5715295  
E-mail [oprkbksap@dpr.go.id](mailto:oprkbksap@dpr.go.id)



# REKOMENDASI PANITIA KERJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2016

Sumber Daya Manusia Indonesia  
di Era Regionalisasi Ekonomi Kawasan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Tahun 2016

---

TIM PENYUSUN BUKU REKOMENDASI PANJA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2016

**PENGARAH**

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.  
*Ketua BKSAP DPR RI*

Juliari P. Batubara  
*Wakil Ketua BKSAP/Ketua Panja MEA*

**PENANGGUNGJAWAB**

Endah T.D. Retnoastuti

**REDAKTUR**

Chairil Patria, S.IP., M.Si.

**EDITOR**

Rd. Anne Widyana, S.S., M.Si.  
Bowo Hoetomo

**DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER**

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.

**PEMBUAT ARTIKEL**

Annisa Mariana, M.Si.  
Dewi Amelia Tresna Wijayanti M.A. (DevSt)  
Mochamad Ilyas, M.A.

**SEKRETARIAT**

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.  
Hilda Kurnia Ningsih, S.H.  
Lita Puspita  
Mochamad Ifan, S.A.B.  
Anie Puji Lestari  
Ahmadi

x+ 88 halaman; 21cm x 29.7cm  
ISBN : 978-602-74746-3-5



# REKOMENDASI PANITIA KERJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2016

Sumber Daya Manusia Indonesia  
di Era Regionalisasi Ekonomi Kawasan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Tahun 2016



Ketua dan Anggota Panja MEA foto bersama setelah melakukan pertemuan dengan para pelaku Kamar Dagang dan Industri Rheinessen

## DAFTAR ISI

VI

Daftar Isi

8

Pengantar Ketua BKSAP  
DPR RI

12

Pengantar Ketua Panja  
MEA 2016

15

Susunan Anggota Panja  
MEA 2016



## I. PENDAHULUAN 17

Latar Belakang	18
Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) - Kementerian Perdagangan RI	23
Analisa Posisi Indonesia dalam Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN	38
• Sumber Daya Manusia (SDM)	38
• Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	42
Satu Tahun Implementasi MEA: Pengalaman Beberapa Provinsi Terdepan Indonesia	45
• Kepulauan Riau Siap Menghadapi Integrasi MEA	45
• Pemberdayaan UKM dan SDM Harus Jadi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	49
• Kesenjangan Sosial Ekonomi: Tantangan Provinsi Riau dalam Era Globalisasi	54
<i>Best Practices</i> Integrasi Kawasan	64
• Integrasi Uni Eropa: Cerminan bagi ASEAN	64
• Sistem <i>On-the-Job Training</i> , Riset dan Teknologi sebagai Pendorong Keunggulan SDM Jerman	70

## II. REKOMENDASI 77

A. Rekomendasi Khusus terkait Sumber Daya Manusia	78
B. Rekomendasi Umum bagi Upaya Peningkatan Kapasitas Dalam Negeri di Era Persaingan Ekonomi Kawasan	81
Lampiran: media covering kegiatan Panja MEA	

## Pengantar Ketua BKSAP



*Assaalaamu'alaikum Warrahmatullaahi wa baraakaatuh.*

Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dengan izin dan karunia-Nya, program kerja Panitia Kerja (Panja) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dibentuk melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dapat terlaksana. Sejak tahun 2015, Panja MEA telah mengimplementasikan sejumlah rencana kerja untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia dalam kerja sama ekonomi regional. Pada periode 2015-2016, program kerja Panja MEA difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini merupakan salah satu

wujud dukungan BKSAP DPR RI terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penggerak roda ekonomi yang menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program kerja dan evaluasi Panja MEA selama tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar seperti Inggris dan Tiongkok.

Pentingnya dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif telah lama digaungkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6/2009. Sebagai salah satu wujud komitmen terhadap kemajuan sektor ekonomi kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dibentuk pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden No. 6/2015. Pada hakikatnya, kreatifitas merupakan akar dari terciptanya inovasi, dan inovasi merupakan akar dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara multikultural tentunya memiliki sumber daya kreatif yang luar biasa besar. Hal inilah yang perlu kita gali dan kembangkan secara terus-menerus sebagai aset dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut kontinuitas dalam inovasi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan energi kreatif yang kita miliki? Di sinilah peranan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyampaikan bahwa kualitas SDM adalah kunci kesuksesan suatu bangsa, terlepas dari sistem politik dan ideologi yang menaunginya. Unsur manusia dalam hal ini bukan hanya dipengaruhi oleh penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari *mindset* bangsa yang optimis, berpikir positif, dan terus bekerja keras. Tiongkok dan Korea Selatan pernah mengalami ketertinggalan, namun mampu bangkit, tidak hanya sebagai *emerging economies*, tetapi menjadi negara-negara yang berpengaruh di tingkat global.

Saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan baru, terutama dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 31 Desember 2015. Mengingat Sekretariat ASEAN dan Sekretariat AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) yang berlokasi di Jakarta, Indonesia, tidaklah berlebihan apabila Indonesia dianggap sebagai 'ibukota' ASEAN. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang termasuk dalam kelompok G-20. Kontribusi Indonesia terhadap perekonomian ASEAN mencapai 60 persen. Oleh karena itu, keberadaan Indonesia bagi ASEAN sangat signifikan. Indonesia harus lebih ambisius dan berkontribusi aktif dalam mekanisme kerja sama regional. Namun, di manakah posisi kita sekarang, satu tahun setelah MEA diberlakukan? Sudah mampukah kita meraih manfaat positif dari sistem perdagangan bebas di ASEAN? Masihkah Indonesia dipandang sebagai macan Asia? Ataukah hanya sebagai 'pengamat' dalam perkembangan regionalisme?

Dalam data yang dirilis oleh *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2016-2017*, peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan dari posisi 37 ke 41. Di kawasan ASEAN, peringkat daya saing Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator tingkat *human capital* mencatat adanya kenaikan IPM Indonesia dari 68,90 pada 2014 menjadi 69,55 pada 2015. Di ASEAN, posisi SDM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Kita harus menyadari bahwa masih banyak 'PR' yang perlu diselesaikan, *changes come from within*. Perubahan pesat berawal dari perubahan kecil dan perubahan kecil berawal dari diri kita masing-masing. Bukan hanya kerja keras yang harus kita lakukan, tetapi kerja cerdas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk membangun kualitas SDM Indonesia, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Berkaca pada pemikiran tersebut, Panja MEA BKSAP DPR RI menyusun sejumlah program kerja untuk mendorong perbaikan kualitas SDM, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini juga selaras dengan posisi pemerintah yang menempatkan pengembangan SDM sebagai poros perubahan. Satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya penyediaan lapangan kerja bagi Warga Negara Indonesia dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Sudah saatnya kita menjadi pemimpin, baik di Indonesia maupun di ASEAN.

Mewakili BKSAP DPR RI, saya menyambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Kami sangat mengapresiasi upaya untuk memperbaiki kualitas SMK guna menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang terampil dan mampu bersaing di tingkat regional. Kami juga meyakini bahwa pengembangan SDM harus dilaksanakan secara simultan di setiap lini kehidupan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Manusia Indonesia yang terampil, tentunya tidak hanya diharapkan untuk dapat menopang sektor industri sebagai pekerja, tetapi juga sebagai *entrepreneur* yang inovatif agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan energi kreatif yang kita miliki.

Selama tahun 2016, Panja MEA BKSAP DPR RI telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain *Focus Group Discussion* yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Sertifikasi Nasional, para akademisi dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam menopang kesuksesan Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, telah dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat sehubungan dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sementara itu, BKSAP juga telah mengadakan pertemuan dengan Parlemen Eropa untuk mendiskusikan mekanisme kerja sama regional yang berlaku di Uni Eropa sebagai referensi bagi ASEAN, khususnya Indonesia sebagai 'ibukota' ASEAN. Panja MEA BKSAP DPR RI juga telah mempelajari strategi pengembangan SDM yang diimplementasikan di Jerman sebagai rujukan bagi segenap

bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk menciptakan perubahan. Studi, hasil evaluasi, dan analisa yang kami lakukan, tertuang dalam Buku Rekomendasi Panja MEA 2016.

Besar harapan saya untuk memenuhi target dan tujuan program kerja Panja MEA BKSAP DPR RI sebagai forum dialog bagi Anggota Panitia Kerja dalam mendukung penyusunan kerangka legislasi dan melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Atas nama Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pendukung Panja MEA yang telah mendorong diterbitkannya buku ini, serta kepada Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau yang telah berkontribusi dan menyampaikan aspirasi mereka mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam kerja sama regional. Semoga rekomendasi yang kami sampaikan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya kita bersama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi.

*Wassaalaamu'alaikum Warrahmatullaahi wa baraakaatuh.*

**Jakarta, 31 Desember 2016**



**Dr. Nurhayati Ali Assegaf**  
**Ketua BKSAP DPR RI 2014-2019**

## Pengantar Ketua Panja MEA 2016



Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Buku Rekomendasi Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 (Panja MEA) dapat dirampungkan. Apresiasi dan terima kasih tak terhingga ditujukan kepada pelbagai pihak yang sejak awal mengawal program-program kerja Panja MEA yaitu: rekan-rekan anggota Panja yang berasal dari lintas fraksi dan komisi.

Rekan-rekan kami di Panja juga tak dapat menunaikan tugas-tugas ke-Panja-annya secara optimal tanpa sokongan dan dukungan, baik substantif maupun teknis, dari mitra-mitra strategis kami. Kredit dan apresiasi

kami sampaikan terutama kepada: Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perdagangan; Kementerian Tenaga Kerja; Badan Sertifikasi Nasional; dan para akademisi. Tentu saja kami mewakili rekan-rekan di Panja MEA 2016 juga berterima kasih kepada 'mitra setia' di kesekretariatan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) khususnya bagian Kerja Sama Regional (KSR) dan Tenaga Ahli BKSAP untuk asistensi secara teknis maupun substantif. Tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, program kerja Panja tak akan terlaksana sesuai rencana.

Buku yang telah kami susun ini harus dibaca sebagai bagian dari buku yang telah terlebih dahulu dipublikasikan. Jika pada buku sebelumnya mendokumentasikan dan mengkonklusikan dari program-program Panja MEA yang difokuskan kepada aspek pengembangan ekonomi kreatif, maka buku kali ini difokuskan pada aspek pengembangan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada konteks ini, pertanyaan yang layak diajukan adalah: kenapa SDM? Apa relevansinya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Dan bagaimana prospek SDM Indonesia khususnya pada level keregionalan? Model ragam pertanyaan seperti ini sangat penting direnungkan sebagai landasan kerangka yang mendasari penyusunan buku ini.

Sekadar menyegarkan ingatan kita, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN bermakna iklim persaingan yang kian mengetat. Implikasinya, secara teoretis hanya negara yang

ber-SDM unggul lah yang akan meraup peluang pasar ASEAN. Masalahnya adalah, seperti apakah posisi SDM Indonesia?

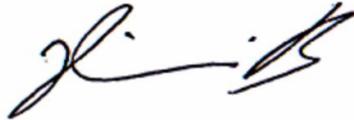
Salah satu alat ukur SDM dapat dibaca dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Merujuk kepada laporan UNDP tahun 2015 diketahui bahwa IPM Indonesia bercokol di peringkat ke-5 dari 11 negara. Indonesia berada di belakang Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sementara posisi Indonesia dalam konteks global berada di peringkat ke-110 dari 188, tertinggal jauh dengan Singapura (peringkat ke-11) dan Brunei (peringkat ke-31) yang berada di 50 besar dunia. Indonesia menempati *tier* menengah bersama Filipina, Viet Nam, Laos dan Kamboja.

Inti dari angka-angka di atas tentu saja mencemaskan kita semua. Dengan populasi usia produktif yang mencapai 40,3 persen dari populasi ASEAN, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi di kawasan. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2035. Penerapan MEA membuka peluang bagi lalu lintas tenaga kerja profesional antar-negara ASEAN. Dalam konteks itulah penguatan SDM Indonesia sebagai titik krusial yang harus mendapatkan porsi perhatian lebih besar dari berbagai pihak. Melengkapi angkatan kerja Indonesia dengan kemampuan dan kompetensi yang tepat menjadi hal yang krusial.

Sejak awal pembentukan, Panja ini memiliki visi untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan keunggulan SDM-SDM Indonesia. Secara pribadi saya meyakini potensi SDM kita belum tergali secara maksimal. 'Berlian-berlian' di bumi Indonesia belum tampak kilaunya lantaran belum tersedianya perangkat-perangkat yang memadai. Sir Ken Robinson, pakar internasional pembangunan SDM pernah mengatakan, *"Human resources are like natural resources; they're often buried deep. You have to go looking for them, they're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves."* Semoga saja buku ini dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya SDM-SDM unggul Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat menyimak lembaran-lembaran buku ini. Kami akan sangat senang jika mendapatkan respons-respons konstruktif bagi kerja-kerja kami di Panja. Kami juga mengharapkan agar pembaca memaklumi jika di sana-sini masih ditemukan kekeliruan-kekeliruan pada buku ini. Ke depan, masih terbentang kerja-kerja lanjutan dari Panja ini.

**Jakarta, 31 Desember 2016**



**Juliari P. Batubara**  
**Ketua Panja MEA DPR RI**

SUSUNAN PANITIA KERJA  
KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN  
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2016

**Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si**

*Ketua BKSAP / Komisi I / F-P Demokrat*

**Juliari P. Batubara**

*Ketua Panitia Kerja MEA, Wakil Ketua BKSAP / Komisi VI / F-PDI Perjuangan*

**Tantowi Yahya**

*Wakil Ketua BKSAP / Komisi I / F-P Golkar*

**H. Rofi' Munawar, Lc.**

*Wakil Ketua BKSAP / Komisi VII / F-PKS*

**H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.Si**

*Wakil Ketua BKSAP / Komisi I / F-PPP*

**Hj. Melani Leimena Suharli**

*Wakil Ketua Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi VI / F-P Demokrat*

**Rita Zahara**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi V / F-P Gerindra*

**Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc**

*Sekretaris Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi  
I / F-P Gerindra*

**Sartono Hutomo**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi VI / F-P Demokrat*

**Sudin**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi  
IV / F-PDI Perjuangan*

**H. Jon Erizal, S.E., M.B.A**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi XI / F-PAN*

**Ir. Nazarudin Kiemas**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi  
VII / F-PDI Perjuangan*

**Ahmad Najib Qodratullah, S.E.**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi XI / F-PAN*

**Yoseph Umar Hadi**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi V  
/ F-PDI Perjuangan*

**Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi I / F-PKB*

**Dr. Effendi M.S. Simbolon, M.I.Pol**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi I  
/ F-PDI Perjuangan*

**H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi III / F-PKB*

**Herman Hery**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi III  
/ F-PDI Perjuangan*

**Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi IV / F-PKS*

**Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi  
VI / F-P Golkar*

**H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi V / F-PKS*

**H. Muhammad Nur Purnamasidi**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi  
IX / F-P Golkar*

**H. Achmad Farial**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi VII / F-PPP*

**Dave Akbarshah Fikarno, M.E**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi I  
/ F-P Golkar*

**Prananda Surya Paloh**

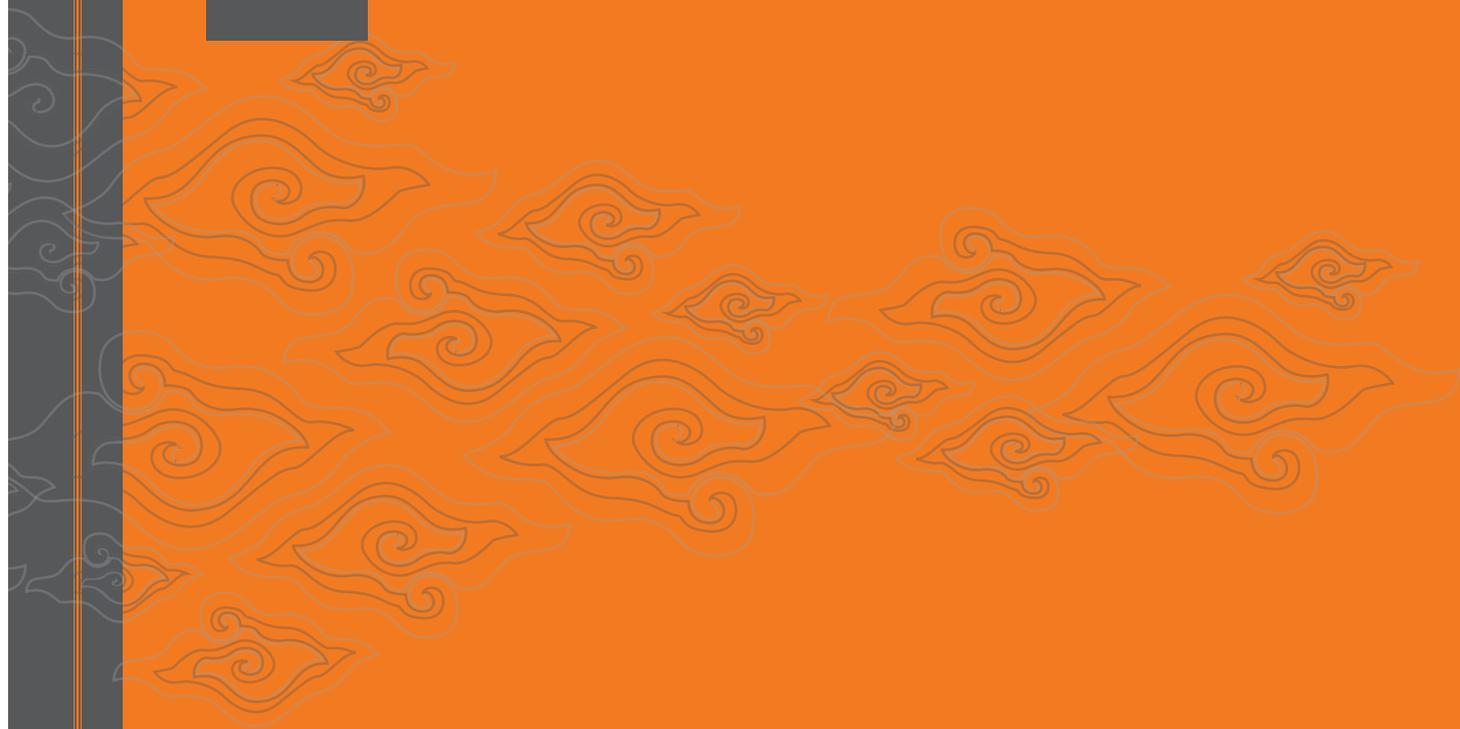
*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi I / F-P Nasdem*

**Ir. Nuroji**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP / Komisi X  
/ F-P Gerindra*

**Ferry Kase, S.H.**

*Anggota Panitia Kerja MEA, Anggota BKSAP /  
Komisi X / F-P Hanura*



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang<sup>1</sup>

Diluncurkan pada 31 Desember 2015, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini telah berjalan selama satu tahun. Meskipun demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kemajuan integrasi ekonomi ASEAN dalam setahun implementasi MEA.

Ketika MEA diluncurkan, tingkat pelaksanaan komitmen integrasi ekonomi ASEAN di antara negara anggota ASEAN berada di sekitar angka 92,7 persen dari 506 langkah-langkah kebijakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sementara ASEAN dapat dikatakan relatif berhasil dalam mencapai tujuannya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan memastikan daerah semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global, beberapa langkah besar harus tetap dijalankan ASEAN untuk mengubah diri menjadi sebuah *full single market* basis produksi dan *competitive economic region*, masing-masing dengan 21 dan 16 langkah kebijakan yang luar biasa yang harus diselesaikan. Dalam pandangan ini, para pengamat ASEAN umumnya sepakat bahwa pada saat itu pada akhir 2015 tidak harus dilihat sebagai *a must-do-target*, tetapi, melainkan sebagai sebuah tonggak awal, di mana ujian yang sesungguhnya bagi MEA akan ada di masa-masa mendatang.

ASEAN juga memperkenalkan *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025*, yang merupakan pemutakhiran dari *AEC Blueprint 2015*. *AEC Blueprint 2025* memuat empat pilar utama yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-

<sup>1</sup> Bank Dunia, 2005, "Mendukung Usaha Kecil dan Menengah", Policy Brief. Diakses dari <http://www.worldbank.or.id> pada tanggal 6 Oktober 2015.

negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara yang penerapannya mengacu pada *AEC Blueprint*.

*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) senantiasa berpijak pada cita-cita untuk menjadi mitra strategis ASEAN dalam pencapaian tujuan regional, yakni mewujudkan *ASEAN Community* yang berdasar pada tiga pilar: *ASEAN Security Community* (ASC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Dalam proses menuju integrasi ASEAN, AIPA memiliki peranan penting, yaitu sebagai katalisator, dinamisator, dan mediator.

AIPA yang awal mulanya dibentuk sebagai *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) didirikan atas inisiatif Indonesia. Pada awal 1970-an, DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang terdiri dari parlemen-parlemen negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari Parlemen Malaysia dan Singapura. Setelah melalui sejumlah pertemuan, AIPO secara resmi didirikan pada 2 September 1977. Selanjutnya, parlemen negara-negara ASEAN lainnya turut bergabung dalam AIPO. AIPO telah memainkan peran penting dalam mencapai sasaran dan tujuan bersama. Seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan dan peluang terus bermunculan di kawasan ASEAN dan menuntut adanya penyesuaian keorganisasian agar AIPO dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Sidang Umum ke-27 AIPO, para negara anggota AIPO dalam *Extra Ordinary Meeting of the Executive Committee* yang diadakan pada bulan April 2007 di Kuala Lumpur, menandatangani Statuta AIPA. Sebagaimana tercantum dalam *the Statutes of AIPA*, AIPA bertujuan untuk:

1. Meningkatkan solidaritas, saling pengertian, kerja sama dan hubungan yang erat antarnegara anggota, *observer* dan organisasi parlemen lainnya;
2. Mendukung tercapainya tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration* Agustus 1967 dan *ASEAN Vision 2020*;
3. Melakukan pertukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dengan ASEAN;
4. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di kawasan ASEAN.

Integrasi regional yang diawali dengan pembentukan MEA akan memberikan kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil. MEA juga akan membuka berbagai kesempatan baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan angka penjualan secara signifikan. Namun, tantangan yang akan timbul pun akan semakin kompleks. Iklim kompetisi di kawasan ASEAN akan semakin meningkat. Para pelaku usaha domestik tidak hanya akan bersaing dengan sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga para pengusaha dari negara lain yang berupaya untuk merebut pasar domestik. Prosedur ekspor-impor akan semakin mudah dan dengan diberlakukannya *zero tariff* maupun *non-tariff barrier*, para pengusaha domestik yang belum memiliki wawasan regional akan terkena dampak dari serbuan produk impor. Apabila produk lokal memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan produk impor, para pengusaha lokal pun akan sulit untuk bertahan dalam era liberalisasi perdagangan.

DPR RI sebagai salah satu *founding father* AIPA memiliki keinginan yang kuat untuk mendukung proses integrasi regional. Pembentukan Panja MEA merupakan salah satu upaya BKSAP DPR RI untuk menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia dengan cita-cita integrasi regional. Melalui Panja MEA diharapkan tercipta *awareness* akan MEA di kalangan anggota parlemen serta pelibatan aktif anggota parlemen. Selain itu diharapkan pula Panja ini dapat berfungsi sebagai kerangka dialog dengan pemerintah guna memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi strategi nasional dalam menghadapi MEA.

Di tahun pertama pembentukannya, Panja MEA berfokus pada industri kreatif mengingat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia semakin banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Sejak diterbitkannya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas individu dan komunitas masyarakat luas semakin berkembang. Hal ini semakin dikukuhkan dengan keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memulai kiprahnya pada 19 Oktober 2011, serta Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang dibentuk sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015.

Namun, sampai sejauh ini perkembangan ekonomi kreatif di tanah air belum banyak menunjukkan perkembangan yang

berarti. Selain minimnya kebijakan yang terintegrasi, upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif juga terkendala persoalan Hak Kekayaan Intelektual yang belum kompatibel dengan pengelolaan karya artistik dan peninggalan budaya tradisional, modal finansial yang terbatas, infrastruktur dasar yang kurang memadai, lemahnya upaya promosi dan pemasaran, serta pengembangan modal sosial, budaya, dan pengetahuan yang minim.

Industri kreatif domestik juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Memasuki era pasar bebas ASEAN akhir 2015, industri kreatif dalam negeri harus bersaing dengan produk-produk impor dengan harga dan kualitas yang kompetitif, khususnya produk-produk dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam persaingan industri kreatif ASEAN, Thailand dan Vietnam kerap disebut memiliki karakteristik paling serupa dengan Indonesia. Berbeda dengan Singapura yang memiliki kekuatan di bidang teknologi dan Malaysia yang seimbang dalam hal teknologi serta inovasi budaya. Tantangan lain juga muncul karena dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memberikan insentif bagi perkembangan industri kreatif. Berbagai tantangan tersebut menjadi sorotan Panja MEA dalam rekomendasi terdahulu.

Di tahun kedua ini, kerja Panja MEA dititikberatkan pada kualitas sumber daya manusia di ruang lingkup UMKM. Rendahnya daya saing serta iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung pengusaha lokal, terutama yang bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia. UMKM di Indonesia sejauh ini masih digunakan sebagai instrumen kebijakan sosial atau kebijakan untuk mengurangi pengangguran atau kemiskinan. UMKM belum dilihat sebagai kelompok bisnis murni. Menghadapi persaingan pasar bebas seperti MEA, perlakuan terhadap UMKM sudah waktunya diubah. Pemerintah dan DPR sudah waktunya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha UMKM agar mampu bersaing di dalam MEA di masa mendatang.

Menurut Bank Dunia (2005), UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005, UMKM di Indonesia mampu menyerap 77.678.498 orang atau sebesar 96,77 persen dari

total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar. Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain, dalam hal penciptaan nilai tambah bagi Produk Domestik Bruto (PDB) maka usaha besar (UB) jauh lebih besar daripada UMKM.

Dengan 57,9 juta pelaku UMKM, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku UMKM di antara negara-negara anggota ASEAN. Untuk tingkat ASEAN, sebanyak 96 persen perusahaan di Indonesia bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap PDB antara 30-57 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja antara 50-98 persen. Berlakunya MEA 2015 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia.

Tantangan bagi sumber daya manusia adalah dengan dibukanya pasar tenaga kerja domestik bagi para pekerja profesional, misalnya akuntan, perawat dan arsitek. Dengan kebebasan arus tenaga kerja terampil, SDM yang lebih kompetitif akan menguasai perolehan lapangan kerja. Perawat di Indonesia akan bersaing dengan perawat dari negara ASEAN. Dalam persaingan ini, standar kualitas SDM yang ditentukan melalui sertifikasi profesi menjadi kunci. Di sinilah kita perlu mengevaluasi, tidak hanya kesiapan para pengusaha lokal, tetapi juga kesiapan para profesional dalam menghadapi MEA.

Sepanjang tahun 2016, berbagai program kerja telah dilaksanakan oleh Panja MEA. Baik turun langsung ke berbagai provinsi terdepan RI maupun melalui dialog dengan Kementerian terkait, akademisi dan praktisi. Hasil kerja tersebut terangkum dalam rekomendasi ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban kerja Panja MEA tahun 2016.

# Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>2</sup>

## Pendahuluan

ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang melingkupi 10 negara ASEAN yang telah memulai integrasinya di bidang ekonomi secara terukur sejak tahun 1992 dan dalam format integrasi yang lebih komprehensif dan dengan visi yang lebih jelas (dituangkan dalam *ASEAN Charter*) sejak tahun 2007.

Dengan potensi ekonomi yang cukup besar di mana jumlah penduduk mencapai lebih dari 600 juta jiwa atau sekitar 9,02 persen dari total penduduk dunia dan total PDB sebesar USD2,43 triliun pada tahun 2015, ASEAN diharapkan akan semakin diperhitungkan peran dan pengaruhnya dalam mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian dunia. Sepanjang sejarah perjalanan integrasinya, ASEAN terbilang kredibel, perekonomian ASEAN dapat dikatakan cukup tangguh dan stabil meski terpaan krisis juga menderanya.

Hingga kini, ASEAN telah membuktikan kemampuannya menjaga pertumbuhan ekonominya pada tingkat yang cukup baik dan relatif stabil. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi ASEAN tercatat sebesar 4,5 persen dan diprediksi meningkat menjadi 4,8 persen pada tahun 2017. ASEAN juga menjadi daya tarik bagi para investor asing mengingat melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia (usia produktif) di mayoritas negara anggota ASEAN. Perekonomian ASEAN diprediksi akan terus tumbuh stabil sejalan dengan peningkatan kualitas dan cakupan integrasi ekonominya dalam 10 tahun ke depan. PDB ASEAN diprediksi akan terus meningkat dan akan mencapai hampir USD4 triliun pada tahun 2020.

Sesuai cita-cita ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), kerja sama dan pelaksanaan komitmen pilar ekonomi yang saat ini telah memasuki tahap ke-2 untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, setelah komitmen integrasi ekonomi tahap ke-1 melalui Cetak Biru MEA 2015 telah diimplementasikan hingga tahun 2015, dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di ASEAN, menghapuskan kemiskinan dan memperkecil perbedaan perkembangan ekonomi antar-negara anggota ASEAN.

<sup>2</sup> Donna Gultom, Direktur Perundingan ASEAN - Kementerian Perdagangan RI.

## Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Perwujudan MEA 2015 merupakan pengejawantahan dari berbagai inisiatif yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam Cetak Biru MEA (*ASEAN Economic Community Blueprint*) 2015 yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN pada tahun 2007. Cita-cita ASEAN yang akan mewujudkan MEA diharapkan akan tercapai dengan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam 4 (empat) pilar dari Cetak Biru MEA, yaitu: (1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi; (2) Kawasan yang berdaya saing; (3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan (4) Kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global, yang memuat berbagai inisiatif yang harus terpenuhi dalam setiap pilarnya hingga akhir tahun 2015.

Dengan demikian, MEA tidak hanya berbicara tentang perdagangan bebas barang atau *Free Trade Area* (FTAs), melainkan seluruh aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercakup dalam 4 (empat) Pilar MEA tersebut antara lain terkait dengan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, infrastruktur, konektivitas, perpajakan, usaha mikro kecil menengah, serta kerja sama dengan negara-negara di luar ASEAN seperti RRT, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Rusia, Kanada dan Uni Eropa.

Total inisiatif dari Cetak Biru MEA 2015 sebanyak 611 inisiatif (*measures*) yang diharapkan dapat terimplementasi seluruhnya pada akhir 2015. Namun demikian, mengingat tingkat sensitivitas beberapa inisiatif tersebut cukup tinggi, hingga 31 Desember 2015, ASEAN hanya mampu mengimplementasikan sebanyak 503 inisiatif, sehingga tingkat implementasi MEA 2015 hanya sebesar 82,3 persen. Sebanyak 108 inisiatif yang belum terimplementasi disepakati untuk dijadikan agenda prioritas tahun 2016-2017. Sebagai *individual country*, Indonesia telah berhasil mengimplementasikan sebanyak 519 inisiatif atau dengan tingkat implementasi sebesar 84,9 persen dan menyisakan sebanyak 92 inisiatif yang akan menjadi prioritas untuk diimplementasikan pada 2016-2017.

## Cetak Biru MEA 2025

Setelah masa implementasi Cetak Biru MEA 2015, sejak tahun 2016, ASEAN telah memasuki babak baru dalam integrasi ekonominya, dan mulai mengimplementasikan komitmen berikut untuk periode 10 tahun ke depan hingga tahun 2025. Pada tanggal 22 Nopember 2015, para Kepala Negara ASEAN telah mendeklarasikan terbentuknya MEA 2015 dan sekaligus menandatangani Cetak Biru MEA 2025 serta mendeklarasikan pengimplementasiannya pada Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Malaysia: *“the 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community”* dan *“the Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging Ahead Together”*.

Dengan ditandatanganinya *“the Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging Ahead Together”*, ASEAN akan melanjutkan proses integrasi ekonominya dengan mengimplementasikan Cetak Biru MEA 2025. Cetak Biru MEA 2025 pada dasarnya melanjutkan hal-hal yang telah dicapai pada Cetak Biru MEA 2015 dalam upaya memperdalam kualitas integrasi serta penambahan isu-isu baru dalam merespons perkembangan dan dinamika kerja sama ekonomi dunia, seperti Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*), *Global Value Chain* (GVC), dan *Good Regulatory Practices* (GRP). Cetak Biru MEA 2025 terdiri dari 5 (lima) pilar utama, yaitu (1) Ekonomi yang Terintegrasi dan Terpadu; (2) ASEAN yang Kompetitif, Inovatif dan Dinamis; (3) Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral; (4) ASEAN yang Tangguh, Berorientasi dan Berpusat pada SDM; dan (5) ASEAN yang Global dengan berbagai inisiatif untuk diimplementasikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari 2016–2025.

Cetak Biru MEA 2025 akan menitikberatkan kerja sama pada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di ASEAN, perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan meningkatkan hubungan keterlibatan antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari pelaku usaha dalam memperdalam integrasi ekonomi di kawasan, serta peningkatan konektivitas di ASEAN.

## Perkembangan Integrasi Ekonomi ASEAN Pasca-2015

Pada tahun 2016, tahun pertama MEA dan implementasi Cetak Biru MEA 2025 pada 1 Januari 2016, beberapa inisiatif yang masih bagian dari Cetak Biru MEA 2015 telah dicapai, antara lain: diluncurkannya *ASEAN Tariff Finder website* yang merupakan situs yang dapat diunggah dunia usaha terkait komitmen tarif bea masuk dari setiap negara ASEAN; diluncurkan dan mulai difungsikannya *website ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade (ASSIST)* melalui *website assist.asean.org* yang merupakan situs yang dapat diakses oleh pelaku usaha ASEAN untuk menyampaikan hambatan maupun kendala dalam perdagangan yang dihadapinya untuk diselesaikan oleh pemerintah di negara di mana hambatan dihadapi; serta pelaksanaan proyek sertifikasi mandiri (*self-certification*), inisiatif yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha ASEAN dalam menerbitkan sendiri Surat Keterangan Asal (SKA Form D) bagi barang yang diekspornya. Penerapan sertifikasi mandiri di ASEAN diperkirakan akan memerlukan waktu panjang karena tingkat kesiapan negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia dalam mendeteksi kemungkinan eksportir asing melakukan pemalsuan terhadap keterangan asal dari barang tersebut.

Perkembangan implementasi 108 inisiatif yang belum terimplementasikan dari Cetak Biru MEA 2015 berdasarkan *monitoring* bulan Februari 2017, dilaporkan bahwa sebanyak 31 inisiatif telah berhasil diimplementasikan, sedangkan 77 inisiatif lagi akan dikerjakan dan diselesaikan oleh badan sektoral terkait pada tahun 2017 ini. Indonesia, sebagai *individual country*, telah melaksanakan sebanyak 41 inisiatif dan tersisa sebanyak 67 *pending* inisiatif yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan pada tahun 2017. Adapun *pending* inisiatif dari Cetak Biru MEA 2015 antara lain terkait: perdagangan jasa, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, konektivitas, dan ratifikasi beberapa perjanjian.

Sementara untuk inisiatif yang tercakup dalam Cetak Biru MEA 2025 dan wajib untuk diimplementasikan hingga akhir tahun 2025 merupakan inisiatif dari hasil kesepakatan 20 badan sektoral yang berada di bawah pilar ekonomi. Inisiatif tersebut disusun dalam bentuk *Strategic Action*

*Plans* (SAPs) yang dilengkapi dengan jangka waktu pelaksanaannya, serta memuat, pada umumnya, *Outputs*, dan beberapa di antaranya memuat hingga *Outcomes* dan *Key Performance Indicators* (KPIs). Hal ini dimaksudkan untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala dalam 10 tahun ke depan. Masing-masing badan sektoral ASEAN tersebut juga menetapkan inisiatif-inisiatif prioritas dari SAP tersebut untuk diimplementasikan setiap tahunnya.

Dalam rangka pendalaman integritas ekonomi ASEAN ini, ASEAN juga telah mengesahkan *Consolidated Strategic Action Plans* (CSAP) yang merupakan gabungan SAP dari setiap badan sektoral ASEAN yang disusun sebagai bahan informasi/panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di ASEAN termasuk para pelaku usaha dalam rangka menuju MEA 2025. CSAP ini telah dapat diakses oleh publik melalui *website* Sekretariat ASEAN (<http://asean.org/asean-economic-community/>).

Selain itu, ASEAN juga telah mengesahkan *Monitoring and Evaluation (M&E) Framework* yang merupakan mekanisme M&E dari implementasi Cetak Biru MEA 2025, yang tidak hanya sekadar *monitoring* berdasarkan *compliance* tetapi *monitoring* berdasarkan tingkat *outcomes*, bahkan hingga *impacts* dari inisiatif-inisiatif dari Cetak Biru tersebut.

Menggunakan hak istimewanya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2017 ini, Filipina juga mengusulkan 9 (sembilan) inisiatif baru di luar inisiatif yang telah menjadi komitmen dalam Cetak Biru MEA 2025, untuk dilaksanakan sebagai prioritas tahun 2017, yaitu: (1) *Regional Self-Certification for MSMEs*; (2) *ASEAN Trade Facilitation Index*; (3) *Focused and Strategic (FAST) Agenda on Investment*; (4) *Conclusion of ATISA and Transition to Negative List*; (5) *Peer Review of AEC*; (6) *ASEAN Inclusive Business*; (7) *ASEAN Declaration of Innovation*; (8) *Women and Youth Entrepreneurship*; dan (9) *ASEAN RORO Davao-Bitung*. Selain kesembilan kegiatan tersebut, dalam rangka merayakan ulang tahun ASEAN ke-50 pada tahun 2017 ini, Filipina juga mempersiapkan berbagai kegiatan, antara lain: *ASEAN 50<sup>th</sup> Anniversary Motorcycle Ride*, *ASEAN Street Food Festival*, *ASEAN Fashion Show*, *ASEAN MSME Internship Initiative*, *ASEAN Business and Investment Summit*, dan *ASEAN CEO Dialogue*.

## Peluang Pasar di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan terintegrasinya ekonomi di ASEAN, jumlah penduduk yang lebih dari 600 juta jiwa terbuka bagi seluruh negara anggota ASEAN sebagai peluang bagi pelaku usaha di Indonesia untuk mengekspansi usahanya. Tentu saja bagi Indonesia, menguasai pasar domestik akan sama artinya dengan menguasai 40 persen pasar ASEAN karena 40 persen penduduk ASEAN adalah penduduk Indonesia. Sehingga apabila Indonesia dapat meningkatkan kinerja ekspornya ke negara ASEAN lainnya, selain juga memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri, maka sesungguhnya lebih dari 40 persen pasar ASEAN telah dikuasai oleh Indonesia.

Sejak 1 Januari 2010, tarif bea masuk telah diturunkan menjadi nol persen untuk sekitar 98 persen dari total pos tarif di ASEAN sehingga terdapat kemudahan dalam meraih peluang pasar ASEAN bagi produk-produk unggulan Indonesia untuk dapat bersaing di pasar ASEAN. Demikian halnya dengan perdagangan jasa, dengan telah ditandatanganinya 8 (delapan) *Mutual Recognition Arrangement* (MRAs) di bidang *architecture, Engineering, nurses, dentist, practical doctor, surveyor, accountant*, dan *tourist professional*, maka tenaga kerja profesional Indonesia akan memiliki peluang yang sangat besar dalam bekerja di perusahaan-perusahaan bertaraf internasional yang tersebar di seluruh negara anggota ASEAN.

Sementara di bidang investasi, dengan telah disepakatinya perjanjian di bidang investasi yang mengatur 4 (empat) elemen yakni liberalisasi, fasilitasi, proteksi dan promosi, terdapat kepastian dan rezim investasi yang kondusif di ASEAN. Melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia produktif (lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif dan Indonesia sedang menghadapi bonus demografi) menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik bagi masuknya investasi asing dari ASEAN.

MEA juga membuka peluang pasar di Negara Mitra Dagang ASEAN melalui kesepakatan *free trade agreements* (FTAs) yang merupakan perwujudan pilar Integrasi dengan Ekonomi Global pada Cetak Biru MEA

2015. Sejak tahun 2006, ASEAN telah mulai melakukannya dengan beberapa Negara Mitra yakni RRT, Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru. Saat ini, dalam rangka terus membangun integrasi dengan Ekonomi Global, ASEAN bersama dengan keenam Negara Mitra tersebut sedang merundingkan pembentukan *Regional FTA* baru yang menggabungkan pasar 16 Negara (10 Negara ASEAN dan 6 Negara Mitra), yaitu *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Ke depan, Indonesia akan punya peluang meningkatkan eksportnya dengan memanfaatkan *regional value chain* atau rantai nilai RCEP.

## Tantangan dan Kendala Indonesia

Di samping memberikan peluang yang cukup besar, MEA juga tanpa bisa dihindari juga memunculkan tantangan yang wajib dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan di ASEAN, tidak hanya para pelaku usaha tetapi juga pemerintah, yakni daya saing. Upaya peningkatan daya saing merupakan tantangan dan pekerjaan rumah Indonesia yang telah diupayakan sejak bangsa Indonesia merdeka. Namun kondisi daya saing Indonesia dirasakan masih tertinggal dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, khususnya Singapura, Thailand dan Malaysia. Fakta menunjukkan bahwa kondisi daya saing Indonesia di ASEAN ternyata berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand dan pada urutan ke-37 dunia (*Global Competitiveness Index 2010-2016*, WEF). Demikian halnya dengan kondisi kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*), posisi Indonesia bahkan berada di urutan ke-6 di ASEAN dan ke-91 di dunia untuk prediksi tahun 2017 (*Doing Business Report 2017*, WB). Situasi ini tentu berpengaruh kepada kemampuan Indonesia meraih peluang pasar ASEAN yang sudah terbuka tersebut.

Secara umum, upaya peningkatan daya saing meliputi daya saing produk dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan daya saing ini memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam mendukung peningkatan daya saing produk nasional, berbagai hal telah diupayakan oleh pemerintah antara lain: pengembangan infrastruktur, peningkatan fasilitasi perdagangan, hingga restrukturisasi birokrasi dan

simplifikasi dan harmonisasi peraturan. Program Nawacita yang sedang dijalankan dalam beberapa tahun ke depan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang telah menghambat upaya peningkatan daya saing.

Dari sisi pelaku usaha, berbagai hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk nasional antara lain: perubahan pola pikir dari *inward-looking* menjadi *outward-looking*, meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, beradaptasi dengan perkembangan tren dunia, serta berinovasi dalam menciptakan diversifikasi produk dan menciptakan *global networking* untuk pemasaran produknya. Sementara itu, masyarakat Indonesia secara umum juga dapat mencintai dan menggunakan produk nasional untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan juga meningkatkan pemahamannya terkait MEA sehingga bisa meningkatkan partisipasi aktifnya sebagai pemenang di era MEA.

Upaya peningkatan daya saing SDM Indonesia juga merupakan tantangan serius Pemerintah. Saat ini tingkat pendidikan SDM Indonesia (Tabel 1a) terbilang rendah karena 43 persen tenaga kerjanya hanya berpendidikan SD ke bawah, dan pada umumnya mereka bekerja di sektor pertanian (33 persen) dan di sektor perdagangan (22 persen). Oleh karenanya, Pemerintah telah mencanangkan dan melaksanakan program peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat dengan mendorong didirikannya sekolah-sekolah kejuruan atau *vocational*. Pengalokasian APBN hingga 20 persen untuk sektor pendidikan merupakan komitmen serius Pemerintah untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Para wakil rakyatpun saat ini tampak turut memikirkan dan mendorong upaya Pemerintah ini agar MEA menjadi bermanfaat bagi perekonomian dan bangsa Indonesia.

#### Kinerja Perdagangan Barang, Jasa dan Investasi

Kinerja ekspor Indonesia maupun negara ASEAN lainnya ke ASEAN (*Intra-trade* ASEAN) masih relatif rendah yaitu 22,3 persen, dan masih lebih rendah dari *share* ekspor negara ASEAN lainnya yakni Thailand, Malaysia dan Singapura, berturut-turut 28,9 persen; 28,2 persen dan 32,3 persen, namun masih lebih tinggi dari *share* negara Filipina dan Vietnam yang hanya 14,6 persen dan 11,1 persen. Dengan demikian, hampir 78 persen ekspor

**Tabel 1a. Tingkat Pendidikan Pekerja Indonesia, Tahun 2015**

Pendidikan Pekerja	Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
SD ke Bawah	52,26	42,7
SMP	22,07	18,04
SMA	22,09	18,05
SMK	12,41	10,14
Diploma (1-3)	3,33	2,72
Universitas	10,21	8,35
Total Angkatan Kerja	122,38	100
Yang Bekerja	114,82	93,82
Menganggur	7,56	6,18

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2015.

**Tabel 1b. Sebaran Tenaga Kerja, Tahun 2015**

Sektor	Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
Pertanian	37,75	32,88
Industri	15,25	13,28
Konstruksi	8,21	7,15
Perdagangan	25,68	22,37
Transport, Pergudangan & Komunikasi	5,11	4,45
Lainnya (keuangan, jasa masyarakat, tambang, listrik, gas dan air)	22,82	19,87

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2015.

Indonesia ditujukan ke Negara Mitra Dagang di luar ASEAN. Oleh karenanya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksinya agar *share* ekspornya ke ASEAN dapat meningkat seperti halnya tiga negara ASEAN yang sudah lebih banyak memanfaatkan pasar ASEAN.

Ekspor Non-Migas Indonesia ke ASEAN sejak tahun 2010 menunjukkan penurunan sebesar empat persen setiap tahun, seiring dengan penurunan total ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara Mitra Dagang dan Dunia, sementara penurunan ekspor Migas tampak lebih signifikan atau

delapan persen setiap tahun (Tabel 2). Penurunan ekspor ke ASEAN didominasi oleh barang industri, sedangkan ke Negara Mitra dan Dunia terutama terjadi karena penurunan ekspor barang tambang yang cukup signifikan.

Penurunan ekspor Non-Migas ke ASEAN pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi karena penurunan barang industri dan sedikit barang tambang, padahal diharapkan dengan menurunnya tarif bea masuk di negara-negara ASEAN sejak 1 Januari 2010 (+98 persen pos tarif bea masuk barang di ASEAN telah nol persen), kinerja ekspor Indonesia ke ASEAN akan terus mengalami peningkatan. Secara keseluruhan tampak bahwa sejak tahun 2011, total ekspor Indonesia ke ASEAN justru mengalami penurunan meskipun penurunan lebih banyak terjadi pada kelompok Migas. Namun demikian karena pada saat yang bersamaan

**Tabel 2. Kinerja Ekspor-Impor Indonesia dengan ASEAN, Periode 2011-2016 (Jan-Nov)**

URAIAN	NILAI (Miliar USD)					JAN -NOV		Perub (%) 16/15	Trend (%) 11-15
	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016		
Ekspor	42,10	41,83	40,63	39,67	33,58	31,05	29,98	-3.45	-4.93
- Migas	9,88	10,58	10,57	10,79	6,29	5,90	3,94	-33.14	-8.45
- Non-Migas	32,22	31,25	30,06	28,88	27,29	25,15	26,03	3.51	-4.03
Impor	51,11	53,66	53,85	50,73	38,80	35,71	31,48	-11.85	-5.90
- Migas	21,32	21,95	23,56	20,96	12,77	11,98	8,65	-27.84	-10.15
- Non-Migas	29,79	31,71	30,30	29,77	26,02	23,73	22,83	-3.78	-3.28
Neraca Perdagangan	-9,01	-11,83	-13,22	-11,06	-5,22	-4,66	-1,50	-67.77	-
- Migas	-11,43	-11,37	-12,99	-10,17	-6,48	-6,08	-4,70	-22.70	-
- Non-Migas	2,42	-0,46	-0,23	-0,89	1,26	1,42	3,20	125.30	-
Total Perdagangan	93,21	95,49	94,48	90,39	72,37	66,76	61,46	-7.94	-5.45
Ekspor Non-Migas									
- ASEAN	32,22	31,25	30,06	28,88	27,29	25,15	26,03	3.51	-4.03
- Mitra ASEAN	64,18	60,95	59,84	53,13	46,79	-	-	-	-
- Ekspor ke Dunia	162,02	153,04	149,92	145,96	131,79	131,79	131,38	-	-

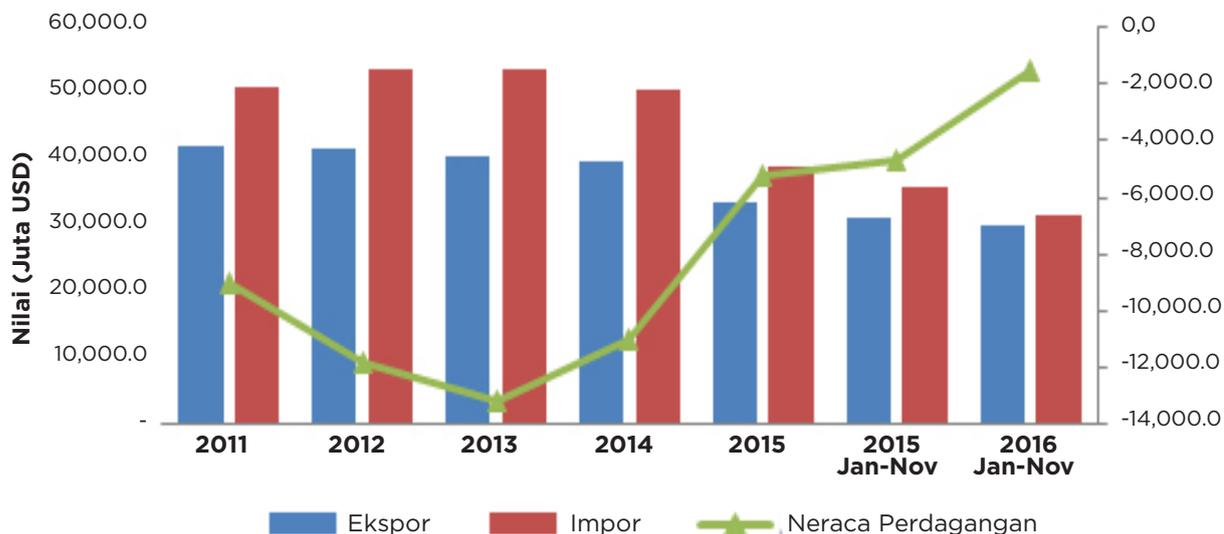
Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

juga terjadi penurunan impor, utamanya disebabkan oleh penurunan impor Migas, defisit neraca perdagangan mengalami penurunan dan bahkan pada tahun 2015, neraca perdagangan Non-Migas mengalami surplus.

Demikian halnya dengan kinerja perdagangan Jasa sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 dan 4, ekspor Jasa Indonesia ke dunia memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada saat yang bersamaan impornya juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari peningkatan ekspor sehingga mengakibatkan neraca perdagangan Jasa Indonesia ke dunia terus-menerus defisit dan cenderung meningkat. Dibandingkan kinerja perdagangan Jasa negara ASEAN lainnya khususnya Singapura, Malaysia dan Thailand, capaian Indonesia masih cukup rendah.

Sementara itu, pemanfaatan komitmen Jasa di bidang 8 (delapan) tenaga kerja profesional, hingga saat ini yang sudah berlaku efektif hanya Jasa *Engineering* dan *Architectural*. Jumlah tenaga professional yang sudah bersertifikasi dan siap mendapatkan kesempatan kerja di negara-negara ASEAN untuk kedua bidang profesi ini masing-masing 2.227 orang untuk *Engineering* dan 364 orang untuk *Architectural* (Tabel 5), di mana terbanyak berasal dari Indonesia, 844 orang atau 38 persen untuk *Engineering* dan 111 orang atau 30,5 persen untuk *Architectural*.

Investasi asing terbesar yang masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun selalu berasal dari Singapura, diikuti dengan Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia (Tabel 6). Pada tahun 2016, investasi asing naik cukup signifikan sehingga menduduki urutan ke-3 setelah Singapura dan Jepang. Hingga saat ini, Indonesia merupakan 3 (tiga) negara di ASEAN yang masih diminati oleh investasi asing, namun kondisi rezim investasi di Vietnam yang sangat kondusif tampaknya dapat menarik masuknya investasi asing ke ASEAN dan bahkan dapat mendorong relokasi investasi asing yang selama ini ada di Indonesia.



**Grafik 1. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan ASEAN, Periode 2011-2015**

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

**Tabel 3. Kinerja Perdagangan Jasa Negara ASEAN-Dunia, Periode 2010-2014 (Miliar USD)**

Negara	2010		2011		2012		2013		2014	
	Ekspor	Impor								
Brunei D	1,05	1,61	1,21	1,83	1,11	1,72	1,13	1,68	1,13	1,69
Cambodia	2,04	0,98	2,75	1,34	3,21	1,54	3,450	1,76	3,82	1,88
Indonesia	16,67	26,46	21,89	31,69	23,66	34,22	22,94	35,01	23,53	33,54
Lao PDR	0,51	0,26	0,55	0,32	0,64	0,38	0,78	0,53	0,76	0,50
Malaysia	33,82	31,83	38,88	38,40	40,63	43,40	41,98	45,02	41,86	45,27
Myanmar	0,35	0,73	0,70	1,10	1,04	1,32	1,90	1,48	3,21	1,94
Philippines	17,78	12,02	18,88	12,32	20,44	14,26	23,34	16,32	24,84	19,96
Singapore	100,83	101,21	118,57	117,43	127,31	129,12	137,30	141,62	140,43	141,55
Thailand	34,32	45,02	41,57	52,14	49,65	53,00	58,64	54,91	55,34	53,20
Viet Nam	7,42	9,86	8,65	11,80	9,58	10,99	10,66	13,78	10,92	14,46
<b>Total</b>	<b>214,80</b>	<b>229,99</b>	<b>253,65</b>	<b>268,36</b>	<b>277,26</b>	<b>289,96</b>	<b>302,18</b>	<b>312,13</b>	<b>305,84</b>	<b>314,00</b>

Sumber: ASEANstats Database, per 15 Januari 2016.

**Tabel 4. Neraca Perdagangan Jasa Negara ASEAN-Dunia, Periode 2010-2014, Juta USD**

Negara	2010	2011	2012	2013	2014
Brunei D	(558.1)	(617.8)	(604.1)	(546.7)	(561.4)
Cambodia	1,059.6	1,416.5	1,666.5	1,736.5	1,940.9
Indonesia	(9,790.5)	(9,803.3)	(10,564.2)	(12,070.5)	(10,008.4)
Lao PDR	247.9	228.0	260.5	246.4	267.2
Malaysia	1,989.2	476.4	(2,768.9)	(3,035.0)	(3,411.8)
Myanmar	(378.5)	(399.1)	(282.3)	419.7	1,266.1
Philippines	5,765.3	6,561.2	6,179.9	7,014.8	4,873.5
Singapore	(380.5)	1,143.9	(1,817.5)	(4,321.6)	(1,126.1)
Thailand	(10,706.3)	(10,569.4)	(3,353.7)	3,730.1	2,134.2
Viet Nam	(2,440.0)	(3,150.8)	(1,418.0)	(3,118.0)	(3,536.0)
<b>Total</b>	<b>(15,191.9)</b>	<b>(14,714.5)</b>	<b>(12,701.7)</b>	<b>(9,944.3)</b>	<b>(8,162.0)</b>

Sumber: ASEANstats Database, per 15 Januari 2016.

**Tabel 5. MRA Professional di ASEAN dan Status Implementasinya**

No	MRA	Tempat dan Penandatanganan	Jumlah TK Bersertifikasi, (Orang)
1	<i>MRA on Engineering Services</i>	Kuala Lumpur, 9 Desember 2005	2.227
2	<i>MRA on Nursing Services</i>	Cebu, Filipina, 8 Desember 2006	Belum Berlaku Efektif
3	<i>MRA on Architectural Services</i>	Singapura, 19 November 2007	844
4	<i>Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification</i>	Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009	Belum Berlaku Efektif
5	<i>MRA on Tourism Professional</i>	Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009	Belum Berlaku Efektif
6	<i>MRA on Accountancy Services</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009	Belum Berlaku Efektif
7	<i>MRA on Medical Practitioners</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009	Belum Berlaku Efektif
8	<i>MRA on Dental Practitioners</i>	Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009	Belum Berlaku Efektif



Situasi Rapat Kunjungan Panja ke MEA Center

**Tabel 6. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia, 2011-2016 (Jan-Sep), Miliar USD**

No	Negara	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Jan-Sep
1	Singapura	5,1 (25,8 %)	4,9 (19,7 %)	4,7 (16,2 %)	5,8 (20,3 %)	5,9 (20,2 %)	7,1 (33,2 %)
2	UE	2,2 (11,1 %)	2,3 (9,2 %)	2,4 (8,3 %)	3,8 (13,3 %)	2,3 (7,7 %)	1,7 (8,1 %)
3	Jepang	1,5 (7,6 %)	2,5 (10,0 %)	4,7 (16,2 %)	2,7 (9,5 %)	2,9 (9,8 %)	4,5 (21,0 %)
4	Amerika S	1,5 (7,6%)	1,2 (4,8 %)	2,4 (8,3 %)	1,3 (4,5 %)	0,9 (3,1 %)	0,43 (2%)
5	Korsel	1,2 (6,1 %)	1,9 (7,6 %)	2,2 (7,6 %)	1,1 (3,8 %)	1,2 (4,1 %)	0,7 (3,5 %)
6	Malaysia	0,6 (3,1 %)	0,5 (2,0 %)	0,7 (2,4%)	1,8 (6,3 %)	3,1 (10,5 %)	0,8 (3,9 %)
7	Taiwan	0,2 (1,2 %)	0,6 (2,6 %)	0,4 (1,4%)	0,1 (0,4 %)	0,1 (0,4 %)	0,1 (0,5 %)
8	Hong Kong	0,1 (0,5 %)	0,3 (1,2 %)	0,4 (1,4%)	0,7 (2,4 %)	0,9 (3,2 %)	1,6 (7,2 %)
9	RRT	0,1 (0,5 %)	0,1 (0,4 %)	0,3 (1,0 %)	0,8 (2,8 %)	0,6 (2,1 %)	1,6 (7,4 %)
10	Australia	0,1 (0,5 %)	0,7 (2,8 %)	0,2 (0,7 %)	0,6 (2,1 %)	0,2 (0,6 %)	0,1 (0,7 %)
11	Lainnya	7,1 (36,0 %)	9,9 (39,7 %)	10,6 (36,5 %)	9,9 (34,6 %)	11,2 (38,3 %)	2,7 (12,5 %)

Sumber: BKPM, 2016.



Kunjungan Panja MEA DPR RI ke MEA Center di Kemendag RI.



# Analisa Kesiapan Indonesia dalam Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

## Sumber Daya Manusia

Berbagai paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan sejak Oktober 2014 dengan tujuan meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia. Berbagai paket kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan deregulasi, debirokratisasi, peningkatan kepastian hukum dan kepastian usaha yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional dan meningkatkan *ease of doing business* di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi jilid XIV telah melingkupi pula isu kekinian *e-commerce*. Hal ini untuk mempersiapkan perekonomian Indonesia di tengah *fourth industrial revolution* yang antara lain ditandai dengan transformasi global menuju transisi ke arah sistem baru yang dibangun di atas landasan revolusi digital.

Tampaknya berbagai paket kebijakan tersebut telah mampu memberikan hasil positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan *Ease of Doing Business Index* tahun 2017 yang disusun *World Bank*, Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 106 telah memperbaiki peringkatnya menjadi 91.<sup>3</sup> Menurut Rodrigo Chaves, *World Bank Country Director for Indonesia*, beberapa faktor yang berperan dalam meningkatkan peringkat Indonesia adalah akses terhadap sumber listrik, pengurusan status kepemilikan properti, akses terhadap pendanaan, serta kemudahan pembayaran pajak, perdagangan lintas batas negara dan kemudahan penyusunan kontrak-kontrak perdagangan.

*Global Competitiveness Index* tahun 2016–2017 yang disusun *World Economic Forum* menempatkan Indonesia di posisi 41 setelah beberapa tahun sebelumnya di posisi 37. *Global Competitiveness Index* menerjemahkan daya saing sebagai satu perangkat kelembagaan, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu ekonomi. Terdapat 12 pilar yang menjadi rujukan yaitu kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi.

<sup>3</sup> Data diperoleh dari Ease of doing business index <http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ>.

Untuk tahun 2017 ini, hasil yang didapat dari 12 pilar tersebut mengkonfirmasi peringkat *ease of doing business* dari *World Bank*. Indonesia mengalami peningkatan performa secara signifikan dari segi pengembangan pasar finansial (peringkat

42, naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya). Performa positif juga ditemui di pilar ukuran pasar, lingkungan makroekonomi dan inovasi. Tetapi Indonesia masih mencatat performa kurang bagus di pilar kesehatan dan pendidikan dasar (turun 20 peringkat). Pilar efisiensi pasar tenaga kerja masih menunjukkan performa kurang bagus yang diakibatkan oleh berbagai bentuk kekakuan dalam pasar tenaga kerja, tingginya biaya redundansi dan rendahnya partisipasi perempuan. Indonesia juga mencatatkan performa kurang bagus dari segi kesiapan teknologi yang diakibatkan oleh rendahnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini hanya seperlima dari populasi yang memiliki akses internet dan hanya satu koneksi *broadband* untuk setiap 100 orang.

Apabila disandingkan dengan sesama negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN, ranking Indonesia masih di rentang 10 besar dari 16 negara.

**Tabel 7. Global Competitiveness Index ASEAN dan Negara Mitra ASEAN<sup>4</sup>**

Negara	Ranking		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Singapura	2	2	2
Jepang	6	6	8
Selandia Baru	17	16	13
Australia	22	21	22
Malaysia	20	18	25
Korea Selatan	26	26	26
Brunei Darussalam	26	na	58
Tiongkok	28	28	28
Thailand	31	32	34
Indonesia	34	37	41
Filipina	52	47	57
India	71	55	39
Vietnam	68	56	60
Laos	93	83	93
Kamboja	95	90	89
Myanmar	na	131	na

Lantas, bagaimana posisi Indonesia dilihat dari daya saing sumber daya manusia? Terutama di kawasan Asia Tenggara. Mengingat pemberlakuan MEA telah menipiskan batas lalu lintas tenaga terampil antar-negara anggota ASEAN.

<sup>4</sup> Data diperoleh dari World Economic Forum, 2016 dan paparan Kementerian Perdagangan RI pada FGD Panja MEA tanggal 24 November 2016.

Seiring dengan visi Pemerintah RI di bawah Presiden Joko Widodo yang menuju percepatan pembangunan nasional untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam budaya maka telah disusun arah kebijakan pembangunan nasional di bawah Nawacita. Salah satu yang menjadi fokus adalah pengembangan kapasitas tenaga kerja sebagai agenda prioritas Nawacita ke-3 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

*Human Capital Index* yang diterbitkan *World Economic Forum* melakukan pengukuran dan mengkuantifikasi kapasitas *human capital* negara-negara berkembang. Pengukuran dilakukan tidak hanya melalui evaluasi tingkat pendidikan, keterampilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan namun pada upaya negara-negara untuk memanfaatkan potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 72 dengan skor 67,61. Peringkat tersebut menjadikan *human capital* Indonesia berada di atas Kamboja, Laos dan Myanmar namun masih di bawah negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan catatan, indeks ini hanya melihat kondisi *human capital* di 9 negara ASEAN karena kurangnya ketersediaan data untuk Brunei Darussalam.

**Tabel 8. *Human Capital Index 2016 ASEAN*<sup>5</sup>**

Peringkat Global	Negara	Skor
13	Singapura	80,94
42	Malaysia	74,26
48	Thailand	71,86
49	Filipina	71,75
68	Vietnam	68,39
72	Indonesia	67,61
100	Kamboja	58,88
106	Laos	57,66
109	Myanmar	56,52

<sup>5</sup> Data diperoleh dari <http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/rankings/>.

Lalu bagaimana dengan kondisi pasar tenaga kerja di ASEAN? Masih dari data yang terangkum dalam *Human Capital Outlook: ASEAN*, mencari tenaga terampil di Indonesia masih terbilang mudah. Meskipun pendapatan rata-

rata perbulan dalam USD masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan hanya selisih sedikit dengan Filipina dan Vietnam. Hal ini pada tingkat tertentu disebabkan oleh demografi populasi Indonesia yang didominasi oleh usia produktif di tahun 2016.

Apabila dilihat dari profil tingkat pendidikan, negara-negara anggota ASEAN sejajar dalam pemenuhan pendidikan dasar, namun bervariasi di tingkat pendidikan menengah (umum dan kejuruan) maupun pendidikan tinggi. Dari grafik di samping terlihat masih diperlukan penguatan pendidikan menengah kejuruan. Dengan pengembangan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menjembatani ketidaksesuaian antara keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang selama ini menjadi tantangan dunia pendidikan Indonesia.

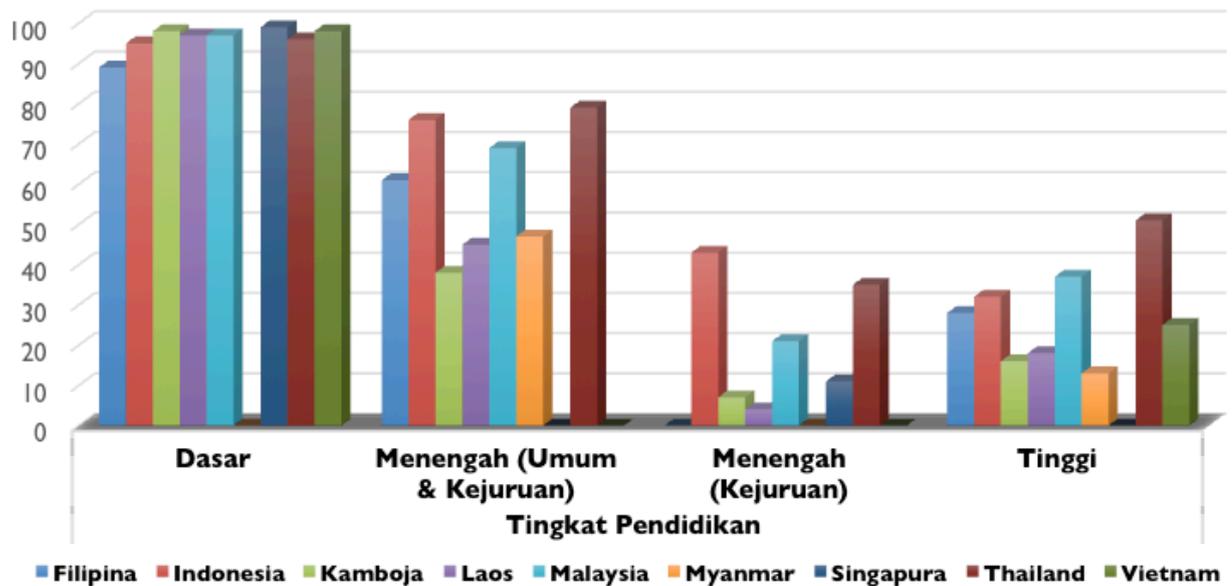
**Tabel 9. Kondisi Pasar Tenaga Kerja ASEAN<sup>6</sup>**

Negara	Kemudahan Mencari Tenaga Terampil (Skala 7 = Termudah 1= Tersulit)	Pendapatan Rata-Rata Perbulan (USD)
Filipina	4,4	206
Indonesia	4,3	174
Kamboja	3,4	121
Laos	3,1	119
Malaysia	5,3	609
Myanmar	2,4	na
Singapura	4,8	3547
Thailand	3,8	357
Vietnam	3,4	181

Di antara negara-negara anggota ASEAN, Vietnam merupakan negara yang paling serius dalam pengembangan kompetensi pendidikan kejuruan, antara lain dengan menerapkan strategi pelatihan kejuruan 2011-2020 dan penerapan standar internasional melalui pembentukan tiga pusat akreditasi regional. Diharapkan dengan semakin meningkatnya kerja sama pengembangan pendidikan kejuruan di ASEAN, antara lain melalui *TVET Training and Conferences*, permasalahan tenaga kerja berkualitas yang tengah dihadapi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dapat terselesaikan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Data diperoleh dari [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_ASEAN\\_HumanCapitalOutlook.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_HumanCapitalOutlook.pdf).

<sup>7</sup>Dit. Kerja Sama Fungsional ASEAN, Meningkatkan Daya Saing Melalui Pendidikan Kejuruan, Masyarakat ASEAN, Edisi 7, 2015.



Grafik 2. Profil Tingkat Pendidikan di ASEAN (% Usia Sekolah)<sup>8</sup>

### Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan UMKM terintegrasi dalam pilar ketiga MEA 2015. ASEAN menyadari posisi strategis dan kontribusi UMKM bagi ekonomi kawasan. Statistik mencatat bahwa 96 persen bentuk usaha di ASEAN dapat digolongkan sebagai UMKM. Saat ini UMKM memberikan kontribusi sekitar 30 sampai 57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja antara 50-95 persen. Di Indonesia, dari seluruh unit usaha yang ada tercatat 99,98 persen dapat digolongkan sebagai UMKM dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 57 persen dan menyerap 97 persen tenaga domestik.<sup>9</sup>

Sejak 1995, ASEAN telah merintis kerja sama sektor UKM melalui pembentukan *ASEAN Working Group on Small and Medium-Sized Enterprises Agency* yang pada tahap awal hanya terfokus pada sektor manufaktur. Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM yang bertujuan untuk menjadi landasan Kelompok Kerja tersebut telah pula disahkan di Jakarta pada tanggal 24 April 1995. Saat ini telah disepakati *Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025* sebagai landasan strategis menuju visi UMKM 2025. Rencana Aksi Strategis tersebut secara spesifik telah pula menyertakan tujuan yang ingin dicapai, perangkat indikator kunci (*key performance indicator*) sebagai mekanisme evaluasi capaian dan menetapkan roadmap pencapaian negara-negara ASEAN. Dalam 5 tahun pertama implementasi MEA, kebijakan dan program UMKM di ASEAN difokuskan bagi integrasi MEA dan mata rantai regional sedangkan tujuan strategis kerja sama UMKM di 2021-2025 lebih difokuskan pada penciptaan UMKM ASEAN yang kompetitif, inovatif, inklusif, dan tangguh secara global.

<sup>8</sup> Data diperoleh dari [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_ASEAN\\_HumanCapitalOutlook.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_HumanCapitalOutlook.pdf).

<sup>9</sup> Ashariyadi, Mewujudkan UMKM Berdaya Saing di Era MEA, *Majalah Masyarakat ASEAN*, Edisi 12, Juni 2016 di akses dari <http://www.kemlu.go.id/Majalah/Majalah%20Masyarakat%20ASEAN%20edisi%2012.pdf>

Selanjutnya, bagaimana dengan kesiapan UMKM dalam negeri untuk bersaing di era MEA? Dari penelitian yang dilakukan Kementerian UMKM mengenai kesiapan UMKM Indonesia yang mengambil 255 sampel UMKM yang tersebar di 6 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) didapatkan kesimpulan bahwa 13,77 persen UMKM dalam kategori “Cukup Siap”, 77,73 persen UMKM masuk dalam kategori “Kurang Siap” dan 8,5 persen lainnya masuk dalam kategori “Tidak Siap”.

Penelitian tersebut mengadopsi aplikasi model McKinsey-GE yang mempertimbangkan dimensi lingkungan strategis eksternal dan lingkungan strategis internal. Faktor strategis internal mencakup faktor determinan yang mencerminkan kekuatan bisnis UMKM meliputi antara lain sumber daya manusia, administrasi dan organisasi, lembaga, dan rasio finansial dengan kontribusi total. Sedangkan faktor eksternal meliputi kompetisi alamiah, aksesibilitas pasar, aksesibilitas pembiayaan, rantai pasok dan lingkungan industri.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Situmorang, J.W., Indeks Kesiapan UMKM Menghadapi MEA, Majalah Masyarakat ASEAN, Edisi 12, Juni 2016 diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Majalah/Majalah%20Masyarakat%20ASEAN%20edisi%2012.pdf>.

**Tabel 10. Pelatihan Tenaga Kerja<sup>11</sup>**

Negara	Tahun Survey	Persentase perusahaan yang memberikan pelatihan formal			Proporsi persentase pekerja yang diberikan pelatihan formal			Proporsi persentase unskilled workers (dari total tenaga kerja)		
		Kecil	Menengah	Besar	Kecil	Menengah	Besar	Kecil	Menengah	Besar
Indonesia	2009	2,8	13,2	37,5	56,5	55,6	39,7	19,4	23,1	38,1
Kamboja	2013	66,0	68,8	85,9	59,1	61,5	67,2	46,4	49,2	56,2
Laos	2012	15,7	36,4	76,3	NA	41,5	29,5	17,9	40,4	39,0
Myanmar	2014	10,3	25,6	31,4	62,5	49,3	38,9	20,5	31,2	59,2
Malaysia	2007	17,0	40,7	79,7	26,8	33,4	32,3	63,6	65,8	64,9
Filipina	2009	14,7	32,1	60,0	59,5	70,9	71,8	7,8	11,6	13,4
Thailand	2006	30,9	63,3	94,9	NA	NA	NA	79,7	82,3	85,4
Vietnam	2009	11,6	49,1	53,2	66,0	62,3	70,7	10,5	24,3	21,6

Lalu bagaimana bila ditinjau dari upaya UMKM dalam melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia?

Berdasarkan data dari *World Bank Enterprises Survey*, Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia untuk memetakan posisi UMKM Indonesia di era MEA dan pasca-MEA menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas tenaga kerja Indonesia masih relatif terbatas. Namun dalam hal ini ketersediaan hasil survei pada tahun yang paralel di masing-masing negara ASEAN merupakan tantangan tersendiri.

<sup>11</sup> Data diperoleh dari [http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20UMKM%20dalam%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20\(2015\)%20dan%20Pasca%20MEA%202025.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Pemetaan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20UMKM%20dalam%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20(2015)%20dan%20Pasca%20MEA%202025.pdf).

Sehingga data yang digunakan Bank Indonesia tersebut mengambil tahun survei yang bervariasi.

Dari Tabel 10 di bawah dapat dilihat bahwa persentase usaha di Indonesia yang memberikan pelatihan formal kepada tenaga kerja untuk usaha kecil masih berada di kisaran 2,8 persen. Persentase tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Selanjutnya, standar kesiapan UMKM dapat pula diukur melalui sertifikasi mutu internasional. Berdasarkan kajian Bank Indonesia tersebut, diketahui pula bahwa pada tahun 2009 sebanyak 1,6 persen perusahaan skala kecil dan 6,3 perusahaan skala menengah di Indonesia telah memiliki sertifikat mutu internasional. Persentase tersebut terbilang kecil apabila dibandingkan dengan Filipina yaitu 8,6 persen usaha skala kecil dan 18,6 persen usaha skala menengah telah memiliki sertifikasi. Di tahun yang sama, 6 persen usaha skala kecil dan 13,2 persen usaha skala menengah di Vietnam telah memiliki sertifikat mutu internasional.

Melalui RPJMN 2015–2019 Pemerintah RI melakukan upaya penguatan daya saing nasional yang terfokus pada: a) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek; b) Penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi; c) Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM; d) Penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, pemberdayaan buruh, dan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi MEA 2015.<sup>12</sup> Hal ini untuk menyelaraskan dengan kebijakan dan program untuk UMKM di ASEAN yang saat ini difokuskan kepada pengembangan kewirausahaan dan SDM; peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen, pemasaran, jaringan rantai pasok, teknologi dan inovasi; serta advokasi dan dukungan informasi melalui kerja sama lintas sektoral.

<sup>12</sup> file:///C:/Users/User/Downloads/renstra-d7-2015-2019.pdf.

# Satu Tahun Implementasi MEA; Pengalaman Beberapa Provinsi Terdepan Indonesia

## Kepulauan Riau Siap Menghadapi Integrasi MEA

Kepulauan Riau (Kepri) optimis dalam menghadapi MEA dan memiliki visi menjadi salah satu kawasan unggulan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepri memposisikan diri untuk memanfaatkan MEA sebagai peluang bukan hanya tantangan. Sebagai garda terdepan dan pintu masuk ke wilayah NKRI, terutama menghadapi negara tetangga yang relatif lebih siap dari segi SDM, Kepri menyadari Indonesia harus mengelola keunggulan kompetitif yang dimiliki.

Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang dimiliki Kepri menjadikan daerah ini berpengalaman dalam mengelola perdagangan bebas. Selain itu Batam, Bintan, Karimun merupakan *pilot project* pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Bebas. Implementasi KEK diatur melalui PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, PP No. 47 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 tentang KPBPB Karimun. Ketiga PP tersebut merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Anggota Panja sedang  
mendengarkan paparan dari  
Pengelola Bintan Resort  
Cakrawala di Lagoi



Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kepri dengan kawasan wisata terpadu Lagoi sebagai aset pariwisata utama Kabupaten Bintan. Pada tahun 2015, terhitung 522,075 wisatawan mancanegara berkunjung ke kawasan ini. 28,19 persen merupakan wisatawan asal Singapura dan 21,08 persen asal Tiongkok. Sektor pariwisata menyumbang 60,70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan saat ini atau mencapai sekitar 81 miliar rupiah. Sejalan ini pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Lagoi dikelola oleh PT. Bintan Resort Cakrawala yang sahamnya dimiliki bersama oleh Singapura dan Indonesia.



Terkait SDM, Kepri mengenai kualitas tenaga kerja, peran pemerintah pusat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini dinilai belum maksimal. Demikian pula dengan peran Badan Nasional Sertifikasi (BNSP), dan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) di setiap propinsi di Indonesia sebagai mitra kerja BNSP. Mengingat sertifikasi merupakan salah satu rujukan kompetensi yang berlaku di seluruh negara anggota ASEAN, percepatan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program sertifikasi kompetensi dinilai memiliki urgensi.



Delegasi Panja MEA BKSAP berdiskusi dengan pihak Pengelola Bintang Resort Cakrawala. Pada kesempatan ini, Delegasi juga menyempatkan untuk mengunjungi Lagoi Plaza yang ditargetkan menjadi pusat kegiatan wisatawan di Lagoi.

Selanjutnya Kepri mengusulkan mengenai penguatan mekanisme perlindungan tenaga kerja lokal, antara lain dengan aturan yang mewajibkan calon tenaga kerja dari negara-negara lain di kawasan ASEAN mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, diusulkan untuk peninjauan kemungkinan menerbitkan regulasi yang mengatur PMA dari ASEAN wajib memperkerjakan tenaga kerja lokal.



Anggota Panja MEA, Yth. Fery Kase, SH, (F-P Hanura) menyampaikan pandangannya dalam diskusi bersama jajaran SKPD Provinsi Kepulauan Riau.



Anggota Panja MEA, Yth. H. Melanie Leimena Suharli (F-PD) dan Yth Rita Zahara, SH (F-Gerindra) secara aktif berdiskusi mengenai peran parlemen dalam menyokong daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam MEA.





## Pemberdayaan UKM dan SDM Harus Jadi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara

Dalam mekanisme MEA, diperlukan berbagai terobosan baru bagi sektor usaha berbasis ekonomi kerakyatan, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas. Kedua hal tersebut tercermin dari kesiapan pemerintah daerah Sumatera Utara dalam menyongsong era liberalisasi perdagangan. Proses integrasi ekonomi regional terus bergulir dan seiring dengan perubahan yang terjadi di kawasan ASEAN, setiap daerah perlu berbenah diri agar dapat bersaing, baik dengan provinsi lainnya maupun dengan negara-negara ASEAN.

Salah satu aspek pendukung pertumbuhan ekonomi adalah iklim investasi yang stabil dan ramah terhadap investor. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara tahun 2017-2018 telah menetapkan kebijakan untuk mempermudah proses perizinan usaha. Kendati

demikian, sampai dengan Desember 2016, kebijakan satu pintu belum dapat diterapkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Hanya sekitar 30 persen perizinan yang sudah dilimpahkan ke BPPT. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menargetkan untuk menerapkan kebijakan satu pintu pada tahun 2017. Komitmen tersebut patut diapresiasi. Selaras dengan revisi Peraturan Pemerintah No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, DPR RI juga menyambut baik peleburan BPPT dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi untuk mendukung efisiensi birokrasi.



Menerima Souvenir dari pengurus Kawasan Industri Medan.

Dalam bidang SDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemrov Sumatera Utara telah melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi dampak MEA, antara lain melalui pemberian sertifikasi bagi 1.850 pekerja pariwisata. Langkah tersebut perlu diikuti dengan kemudahan sertifikasi bagi 7 (tujuh) profesi lainnya yang menjadi prioritas dalam MEA, yaitu Insinyur, Arsitek, Akuntan, Dokter Gigi, Tenaga Survey, Praktisi Medis dan Perawat.



Wakil Ketua BKSAP, Bapak H. Rofi' Munawar didampingi oleh Bapak Sudin dan Ibu Dwie Aroem Hadiatie meninjau industri kerajinan lokal.



DPR RI juga mengapresiasi didirikannya Tim Pansus MEA yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Sumut dan DPRD Sumut. Melalui kerja sama yang sinergis antara kedua belah pihak, berbagai tantangan yang dihadapi oleh provinsi Sumatera Utara dapat diidentifikasi, yaitu di antaranya: (1) rendahnya kualitas SDM, terutama dalam hal kemampuan manajerial dan penguasaan bahasa asing (Inggris); (2) rendahnya dukungan infrastruktur, khususnya bagi sektor UMKM; (3) lemahnya inovasi, distribusi serta promosi produk UMKM; (4) rendahnya kualitas bahan baku yang digunakan oleh UKM; (5) pola tanam yang belum teratur di sektor pertanian; dan (6) penurunan suku bunga yang tidak bisa diaplikasikan di daerah secara langsung, sehingga mempersulit ketersediaan akses modal bagi UMKM.

Sementara itu, para pelaku usaha kecil dan menengah juga mengeluhkan sejumlah masalah klasik yang dihadapi sektor UMKM secara umum, yaitu: (1) kesulitan dalam hal permodalan; (2) produk lokal yang lebih berkualitas dan lebih murah dibanding produk impor belum dapat bersaing akibat kurangnya pemasaran; (3) rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap orisinalitas produk impor, sementara itu produk-produk lokal dikenai kebijakan standarisasi yang sangat ketat untuk memperoleh sertifikasi SNI; (4) banyak unit UMKM dan koperasi yang gulung tikar karena sulit bersaing; (5) lemahnya sosialisasi MEA di akar rumput (*grassroots*); (6) basis data UKM yang belum memadai; dan (7) tidak adanya kesinambungan antara kebutuhan dan pelatihan UKM yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam era integrasi ekonomi regional, pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius dalam menggarap sektor pariwisata, baik dari segi promosi, maupun perawatan area wisata dan kenyamanan infrastruktur. Sosialisasi MEA yang dinilai rendah, patut disayangkan, karena hal ini menimbulkan ketimpangan informasi di kalangan masyarakat. Kesenjangan informasi akan merugikan sektor UKM dan masyarakat kecil karena mereka tidak dapat memanfaatkan potensi yang timbul dari liberalisasi perdagangan regional.

Sektor UMKM di Sumatera Utara menghasilkan sejumlah produk unggulan, seperti ulos, songket, ukiran kayu, gerabah dan anyaman, kerajinan manik-manik khas Sumatera Utara, sepatu dan pakaian jadi. Produk-produk tersebut pada dasarnya sudah memiliki kualitas yang baik dengan harga yang cukup kompetitif. Namun, kurangnya perhatian terhadap pengemasan produk menyebabkan produk-produk tersebut kurang memiliki daya saing di pasar regional.

Sumatera Utara juga telah mendirikan kawasan industri terpadu yang dikelola oleh PT Kawasan Industri Medan (KIM). Dengan luas area yang mencapai 780 ha, terdapat 600 unit usaha yang telah bergabung di kawasan ini, mulai dari sektor UKM hingga industri bertaraf internasional. Untuk memastikan pertumbuhan sektor industri yang berkesinambungan di provinsi Sumatera Utara, kemandirian energi perlu diupayakan. Pasokan energi listrik yang ada saat ini, belum memadai untuk menopang pertumbuhan industri di provinsi Sumatera Utara.

Program pemberdayaan UMKM yang dicanangkan pemerintah harus diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Program sosialisasi MEA juga harus terus diupayakan secara menyeluruh, baik dari media cetak, televisi, radio, maupun *online*. Sosialisasi MEA bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk memastikan adanya pemerataan arus informasi terkait MEA, sektor swasta dan BUMN juga diharapkan dapat turut berkontribusi dalam melakukan sosialisasi MEA kepada masyarakat di mana mereka beroperasi, dan terutama bagi para pelaku UKM yang menjadi binaannya. Sementara itu, dalam menyongsong kebebasan arus tenaga kerja terampil, pemerintah harus memberikan kemudahan sertifikasi bagi 8 (delapan) profesi yang menjadi prioritas. Bukan hanya prosesnya saja yang harus dipermudah, tetapi juga dari segi biaya.

## Kesenjangan Sosial Ekonomi: Tantangan Provinsi Riau dalam Era Globalisasi



Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87,024 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 12 kota/kabupaten. Dari segi geografis, Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sektor unggulan provinsi Riau terdiri dari migas dan CPO. Selain itu, Riau juga dikenal sebagai penghasil sagu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, sebagai imbas dari jatuhnya harga komoditas, nilai ekspor sawit dan migas Riau turun drastis dari USD2,7 miliar pada periode Januari hingga September 2015 menjadi USD1,9 miliar pada periode yang sama di tahun 2016.

Sejumlah kota/kabupaten di provinsi Riau, seperti Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki potensi untuk tumbuh sebagai sentra industri dan pelabuhan, namun masih mengalami kendala dari segi infrastruktur. Dengan lokasi geografis provinsi Riau yang sangat strategis, pemerintah patut mempertimbangkan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di wilayah tersebut untuk dapat mendukung pertumbuhan sektor industri secara signifikan dan menghentikan arus lalu lintas barang ilegal.





Bupati Kep. Meranti sedang menjelaskan permasalahan perbatasan Kep. Meranti dengan negara tetangga



Wakil Ketua BKSAP, Rofi' Munawar, Lc sedang memberikan tanggapan perihal kesiapan Riau dalam MEA khususnya masalah perbatasan dengan negara anggota ASEAN

Saat ini, sejumlah kabupaten di provinsi Riau masih mengalami kesulitan dalam hal logistik sehingga kesenjangan ekonomi antar-kota/kabupaten di Riau semakin melebar. Kepulauan Meranti merupakan penghasil sagu terbesar di Indonesia, namun mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Kondisi kehidupan warga Meranti mencerminkan kesenjangan antara pulau terluar Indonesia dengan negara tetangga. Perbedaan yang signifikan terlihat dari kondisi pembangunan dan kesejahteraan warga di Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Johor Bahru. Saat ini, tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 32 persen, termasuk dalam 10 kabupaten termiskin di Indonesia. Hal ini

disebabkan antara lain karena mahalannya sembako, kurangnya lapangan kerja, dan peraturan lintas batas yang sangat ketat. Dengan lokasi geografis yang dimiliki Kepulauan Meranti, Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian status FTZ untuk Kepulauan Meranti. Status FTZ diharapkan akan mempermudah warga Kepulauan Meranti untuk memperoleh kebutuhan pokok yang saat ini masih harus didatangkan dari daerah-daerah lain di Indonesia dengan biaya logistik yang sangat tinggi.

Dalam era liberalisasi perdagangan dan globalisasi yang ditandai dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 31 Desember 2015, bukan saja Indonesia yang harus bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, tetapi setiap daerah/provinsi juga harus turut serta dalam upaya meningkatkan daya saingnya masing-masing. Saat ini, dengan kondisi infrastruktur yang ada, masih sulit bagi provinsi Riau sebagai salah satu provinsi terdepan Indonesia, untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Daya saing Provinsi Riau dalam menghadapi MEA berada di urutan ke-16. Pemerintah daerah setempat harus dapat menyusun



Ir. Nazarudin Kiemas sedang menyampaikan aspirasi rakyat mengenai adanya ketakutan dari masyarakat terhadap biaya pendaftaran hak paten



Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom, menanyakan mengenai kebijakan yang mengatur pendapatan minimal (upah minimum) untuk Warga Negara Asing (WNA) di Riau



Sartono meminta kepada Pemprov Riau untuk meningkatkan potensi pariwisata guna menggerakkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan meningkatkan pendapatan daerah



Ahmad Najib Qodratullah, SE sedang menanyakan formulasi prioritas pembangunan strategis khususnya pilar strategis untuk wood-based product dan bidang otomotif



Yoseph Umar Hadi meminta kepada Pemprov Riau untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi MEA



H. Jon Erizal, SE, MBA yang kebetulan berasal daerah pemilihan (dapil) ini menjelaskan Indonesia dalam era MEA

strategi untuk meningkatkan daya saing ini, termasuk dalam mengidentifikasi sarana infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas. Jaringan usaha dan bisnis sektor UMKM juga masih harus dikembangkan, terutama dalam memperluas pangsa pasar, pemanfaatan *e-commerce*, serta perbaikan mutu, kualitas, dan kemasan produk jadi.

Pemerintah pusat memiliki peranan kunci dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang terkait dengan MEA dan liberalisasi perdagangan. Bukan saja kita perlu menerjemahkan/mengadopsi kesepakatan regional terkait MEA ke dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi kebijakan yang komprehensif terkait peningkatan daya saing nasional dan daerah masih harus dikembangkan dan diperbaharui. Ada daerah-daerah tertentu yang harus diberikan ruang dan prioritas terkait pengimplementasian MEA, yaitu di antaranya: 1) Daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; 2) Daerah yang sudah memiliki konektivitas dengan negara-negara ASEAN; dan 3) Daerah yang memiliki produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat regional dan berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Mempertimbangkan kondisi yang dihadapi provinsi Riau dalam menyongsong era liberalisasi perdagangan, ada sejumlah hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: (1) Pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan industri di luar Jawa, terutama di daerah

perbatasan; (2) Pengembangan pelabuhan bertaraf internasional di lokasi-lokasi yang strategis di seluruh Indonesia; (3) Mempertimbangkan pemberian status FTZ untuk Kepulauan Meranti dan daerah-daerah lainnya yang memiliki posisi strategis namun masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik; (4) Peningkatan promosi pariwisata Indonesia secara strategis dan menyeluruh; (5) Meninjau ulang kesiapan daerah/provinsi terkait MEA; (6) Memberikan prioritas pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki potensi; (7) Menyusun payung hukum untuk melindungi tenaga kerja lokal dan meningkatkan kualitas SDM daerah; dan (8) Penguatan jaringan bisnis dan usaha di tingkat regional dengan melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM.



Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si menyampaikan pandangan tentang posisi strategis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura



H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.Si sedang menyampaikan pandangan tentang status FTZ untuk kepulauan di Riau yang memiliki posisi strategis namun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik.



Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf didampingi oleh Ketua Panja MEA, Juliari P. Batubara dan Sartono menyerahkan cinderamata dan Buku Rekomendasi Panja MEA Tahun 2015 kepada Plt. Sekda Riau



H. Achmad Fariat menyerahkan cinderamata kepada Bupati Siak



Foto Bersama Rombongan Panja  
MEA BKSAP DPR RI bersama Plt.  
Sekda Riau, Bupati Siak, Bupati  
Kep. Meranti dan Walikota Dumai



Rombongan Panja MEA sedang meninjau UMKM Batik Riau yang telah siap menghadapi MEA



## Best Practices Integrasi Kawasan

### Integrasi Uni Eropa: Cerminan bagi ASEAN

Globalisasi membuka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh akses pasar, teknologi, dan informasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan kompetisi antara sesama negara berkembang. Kawan dan lawan menjadi kompetitor. Oleh karena itu, di era yang paling liberal sekalipun, negara tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial-ekonomi dalam negeri.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian regional secara keseluruhan. Namun, masih ada kesenjangan di antara sesama anggota ASEAN, baik dalam hal pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, angka kemiskinan, pengangguran, inovasi teknologi, dan level industrialisasi. MEA diimplementasikan hanya dalam waktu 13 tahun sejak Peta Jalan Integrasi Moneter dan Keuangan ASEAN diluncurkan tahun 2003. Cetak Biru MEA juga baru diterbitkan tahun 2007. Sementara itu, rencana integrasi

Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf sedang memperkenalkan Delegasi BKSAP DPR RI saat mengikuti persidangan sebagai pengamat pada pertemuan Committee of International Trade (INTA), Parlemen Eropa



ekonomi Uni Eropa sudah mulai dibicarakan sejak tahun 1950-an dan membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mewujudkan konsep tersebut.

Kawasan Uni Eropa (UE) dan ASEAN memiliki karakter sosial-politik yang jauh berbeda. Struktur masyarakat ASEAN masih belum lama terbentuk bila dibandingkan dengan UE. Kondisi keuangan ASEAN juga belum dapat menandingi anggaran finansial negara-negara Eropa. Kondisi sistem internasional saat ini sudah jauh lebih terbuka dibandingkan tahun 1950-an, ketika integrasi ekonomi UE mulai dicanangkan, atau tahun 1993, ketika UE mulai terbentuk secara formal melalui Maastricht Treaty. Pada 1993, intra-trade UE sudah mencapai sekitar 60 persen sementara intra-trade ASEAN saat ini baru mencapai 25 persen. Hal ini menandakan tingkat komplementeritas yang tinggi antara negara-negara Eropa, sementara negara-negara ASEAN pada umumnya masih *outward-looking*. Sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN, Indonesia harus berupaya untuk mengatasi rendahnya intra-trade kawasan.



Delegasi BKSAP DPR RI saat mengikuti persidangan sebagai pengamat pada pertemuan Committee of International Trade (INTA), Parlemen Eropa

Bagi Indonesia, UE adalah salah satu tujuan ekspor non-migas utama. Sebagai satu-satunya negara anggota G-20 di ASEAN yang memiliki populasi 250 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kerja sama dengan Eropa. Saat ini, 35 persen PDB ASEAN berasal dari Indonesia, namun kerja sama perdagangan bilateral dengan Eropa tidak sebanding dengan posisi Indonesia di ASEAN. Indonesia hanya menjadi partner dagang Eropa terbesar ke-5 di kawasan ini.



Wakil Ketua BKSAP, Bapak Juliari P. Batubara sedang menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Mr. Peter Berz, Directorate General for Trade (DG TRADE), Komisi Eropa

Awalan pembentukan *European Economic Community* (EEC) dan MEA sangat berbeda. Namun demikian, banyak hal yang dapat dipelajari Indonesia dan ASEAN dari UE. Di atas kertas, sudah banyak kemajuan dalam proses pembentukan AEC, namun level integrasi ASEAN masih jauh di bawah UE. Pembentukan UE berlangsung selama puluhan tahun dan prosesnya pun masih berlanjut sampai sekarang. Services market sector misalnya, belum sepenuhnya menikmati kebebasan dalam mekanisme kerja sama UE. Dalam proses integrasi regional, penghapusan tarif merupakan prioritas. Namun demikian, hambatan non-tarif harus dieliminasi, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan transparansi.



Ketua BKSAP, menerima cinderamata se usai pertemuan dengan Directorate General for Trade (DG TRADE), Komisi Eropa.

Dalam mekanisme MEA, ASEAN juga harus menyusun kebijakan berdasarkan prioritas. Perlu dilakukan identifikasi secara menyeluruh mengenai komoditas apa saja yang menjadi unggulan di kawasan ini. Walaupun MEA mengadopsi sistem liberalisasi perdagangan, proteksi dalam lingkup regional masih diperlukan, terutama untuk komoditas atau industri-industri strategis. UE pun masih mengenakan sejumlah restriksi terhadap produk-produk unggulan ASEAN, misalnya ekspor minyak sawit ke Eropa yang sulit untuk ditingkatkan akibat diimplementasikannya sejumlah kebijakan non-tarif. Produk kerajinan kulit dari Indonesia juga dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi untuk memasuki pasar Eropa. Pada dasarnya, produk unggulan negara-negara ASEAN bersifat non-komplementer. Setiap negara ASEAN berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar di luar kawasan. Oleh karena itu, legalitas produk (seperti produk kayu) dan praktek usaha yang berkelanjutan, terutama dalam bidang pertanian harus terus diupayakan agar produk unggulan Indonesia mampu bersaing, tidak hanya di pasar regional tetapi juga di tingkat global.

Dalam UE, kompetisi antar negara anggotanya juga masih terjadi. Sebagai contoh, UE tidak dapat mengatur investor untuk menanamkan modalnya di negara tertentu, karena hal itu bergantung pada tingkat daya saing negara yang



Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf memimpin diskusi dengan Delegation for the relations with ASEAN and Southeast Asian Countries (DASE), Parlemen Eropa.

bersangkutan. Dari sudut pandang budaya, UE sangat menghormati warisan budaya dan bahasa negara-negara anggotanya. Dalam setiap pertemuan, setiap perwakilan negara anggota UE berhak untuk memperoleh informasi dan berbicara dalam bahasa nasionalnya. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat lokal terhadap Uni Eropa.



Anggota Delegasi, Bapak Jon Erizal terlibat dalam diskusi ditengah pertemuan dengan Delegation for the relations with ASEAN and Southeast Asian Countries (DASE), Parlemen Eropa.

Delegasi menghadiri pertemuan dengan Mr. Arnaldo Abruzzini, CEO Eurochambres, dan European Indonesian Business Network



Delegasi mengunjungi Pabrik Coklat Neuhaus yang merupakan salah satu industri unggulan di Belgia.



## Sistem **On-The-Job Training**, Riset dan Teknologi sebagai Pendorong Keunggulan SDM Jerman

Jerman merupakan negara yang mengandalkan riset dan teknologi sehingga mampu melahirkan berbagai inovasi teknologi, seperti mesin, laser, bioteknologi molekuler dan sistem energi berkelanjutan. Jerman juga memiliki rasio volume ekspor yang baik yakni mencapai lebih dari 45 persen PDB.

Jerman merupakan negara dengan jumlah pendaftaran paten tertinggi di Uni Eropa. Produk ekspor unggulan Jerman banyak berhubungan dengan teknologi terutama perangkat lunak, dan teknologi ramah lingkungan. Gelombang krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 tidak serta merta mengganggu perekonomian Jerman. Jerman mampu mengurangi angka pengangguran dengan tetap berupaya untuk memperkuat struktur pembiayaan publik. Bahkan Jerman mengalami surplus neraca transaksi berjalan (current account surplus) hingga 7,6 persen GDP dan merupakan yang tertinggi di dunia dalam mata uang USD.

Keunggulan Jerman terletak pada efisiensi pasar keuangan dan tenaga kerja. Daya saing Jerman secara umum turut didorong oleh iklim usaha yang kondusif, sistem on-the-job training yang memadai, serta perkembangan riset dan teknologi yang sangat pesat. *Global Competitiveness Report 2016-2017* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* menempatkan daya saing Jerman di urutan ke 5 besar dunia. Rata-rata pertumbuhan PDB Jerman selama periode 1992-2016 mencapai 1,33 persen per tahun dengan rekor pertumbuhan tertinggi 6 persen pada kuartal pertama 2011 dan terendah mencapai -7,9 persen pada kuartal kedua 2009.

Pelatihan vokasional menjadi kunci keunggulan SDM Jerman. Jerman mengatur pelaksanaan praktek kerja di lingkungan profesional diatur *Vocational Training Act 1969* yang di amandemen pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan ini, pemuda angkatan kerja dapat melaksanakan kerja praktek untuk bidang-bidang kejuruan yang mendapatkan pengakuan secara nasional melalui sertifikasi yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Industrie-und Handelskammer - IHK) dan Kamar Pertukangan (Handwerkskammern). IHK berupaya mendorong perekonomian dan memperhatikan



Ketua Delegasi, Sdr. Juliari P. Batubara menyampaikan paparan mengenai peran serta DPR RI dalam mendukung implementasi MEA dihadapan para pelaku kamar dagang dan Industri Rheinessen

kepentingan perusahaan di wilayah kerjanya, salah satunya melalui kewenangan untuk menyediakan pendidikan kejuruan.

Dalam pengelolaan pelatihan kejuruan di Jerman, terdapat pemisahan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat, negara bagian dan sektor swasta. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan profesi pendidikan kejuruan, mekanisme pengujian dan mendorong penelitian terkait pendidikan kejuruan. Pemerintah Negara Bagian memiliki tanggung jawab untuk mengelola sekolah kejuruan dan melaksanakan pengawasan terhadap kamar dagang dan industri setempat. Sedangkan, Perusahaan dan serikat pekerja bertanggung jawab untuk mempersiapkan alokasi profesi, mendelegasikan tenaga ahli untuk merumuskan peraturan; dan menyediakan peraturan yang terkait kontrak kerja bagi siswa pendidikan kejuruan.

Kesuksesan UMKM di Jerman merupakan kombinasi faktor kesuksesan internal dan ketersediaan sumber daya yaitu



Delegasi BKSAP DPR RI mengikuti pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Energi (Bundes Ministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi)

tenaga kerja yang berkualitas tinggi sebagai hasil sistem pelatihan kejuruan ganda; tingkat inovasi yang tinggi melalui infrastruktur riset dan pengembangan serta skema dukungan inovasi; pembiayaan untuk investasi dan pengembangan melalui penyediaan ekuitas permodalan sektor komersial dan pembiayaan publik; dan orientasi ekspor/internasionalisasi melalui promosi dagang dan investasi.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dari segi tingkat keterampilan tenaga kerja. Keterbatasan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian vokasional sesuai standar perusahaan asing merupakan kendala tersendiri. DPR sesuai dengan fungsinya dapat mendukung dan mengawasi inisiatif Kementerian Tenaga Kerja yang tengah memperkuat investasi Penanaman Modal Asing (PMA) melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan sistem pelatihan kerja dan penyusunan proses sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia.



Delegasi BKSAP DPR RI mengikuti pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Energi (Bundes Ministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi)



Delegasi BKSAP DPR RI saat mengadakan pertemuan dengan Parlemen Jerman.

Delegasi BKSAP DPR RI pada saat kunjungan ke industri pengolahan kaca industri, Schott.



Ketua BKSAP melakukan Courtesy Call dengan Anggota Parlemen Eropa

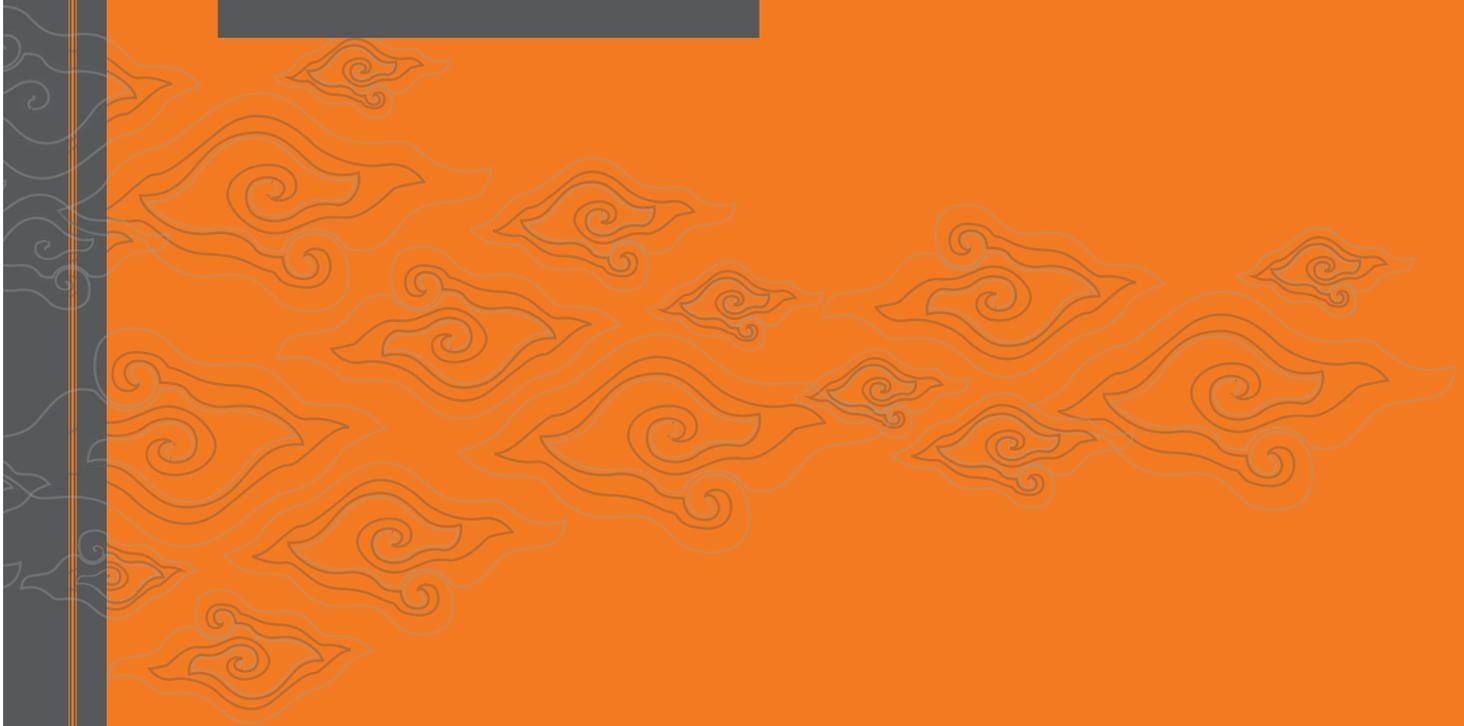




Delegasi BKSAP DPR RI pada saat kunjungan ke industri Pembuatan Gas Turbin, Siemens AG.



2



# REKOMENDASI

## A. Rekomendasi Khusus terkait Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan visi penguatan sumber daya manusia di era MEA yang merupakan fokus kerja panja MEA BKSAP tahun 2016, beberapa hal di bawah ini menjadi rekomendasi untuk menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dalam regionalisasi ekonomi ASEAN.

### 1. MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Penguatan mekanisme perlindungan tenaga kerja lokal, antara lain dengan aturan yang mewajibkan calon tenaga kerja dari negara-negara lain di kawasan ASEAN mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberikan persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para Tenaga Kerja Asing. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 26 Butir (d) Permenakertrans No.12 Tahun 2013, namun ketentuan wajib berbahasa Indonesia telah dihapuskan seiring dengan pergantian kebijakan melalui Permenaker No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal ini, selayaknya dilakukan kajian mendalam mengenai kemungkinan untuk tetap memberlakukan ketentuan tersebut karena di satu sisi dapat mendukung implementasi kewajiban alih teknologi yang diamanatkan UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia yang dimiliki tenaga kerja asing tentunya akan memperlancar proses alih teknologi tersebut.

Selain itu, mengemukakan usulan untuk melakukan peninjauan mengenai kemungkinan menerbitkan regulasi yang mengatur PMA dari ASEAN wajib memperkerjakan tenaga kerja lokal. Usulan tersebut mengemukakan dalam dialog dengan berbagai stakeholders di Batam dan Bintan. Hal tersebut dapat dipahami terutama dengan merebaknya berita-berita mengenai membanjirnya tenaga kerja asing yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Berita-berita tersebut sebaiknya disikapi dengan kehati-hatian dan dilakukan *cross-check* dengan pihak-pihak terkait. Dalam kerangka MEA, mobilitas tenaga kerja diatur melalui MRA yang secara spesifik telah membatasi pertukaran tenaga kerja hanya untuk tenaga kerja profesional (*skilled labour*) yang termasuk dalam 8 bidang sertifikasi ASEAN. Selain itu perjanjian di antara negara-negara ASEAN memungkinkan

PMA yang memiliki keberadaan komersial di negara ASEAN lainnya (Moda 3 Perdagangan Jasa Internasional - Commercial Presence) atau melakukan joint venture untuk membawa SDM sendiri dari negaranya apabila dibutuhkan.

Bab VIII UU No. 13 Tahun 2003 telah mengatur secara jelas mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Langkah-langkah sidak ke perusahaan PMA yang memperkerjakan tenaga kerja asing yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja di penghujung tahun 2016 layak diapresiasi. Dan sebaiknya penguatan pengawasan Kemenaker menjadi langkah konsisten guna menghalau isu-isu negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

---

## 2. MELAKUKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai pengadaan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas SDM terutama pada Bab V yang terkait pemberian pelatihan kerja. Salah satu implementasi Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menjadi pedoman bagi pelatihan kerja untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Dalam hal ini penguatan Undang-Undang tersebut terutama dalam hal implementasi sebaiknya menjadi salah satu fokus kerja komisi terkait di DPR RI.

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah mengenai mismatch antara supply tenaga kerja dengan kebutuhan *labor market*. Selain optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini, penyediaan akses permagangan selayaknya mendapatkan perhatian tersendiri. Dibutuhkan sinergi antara kementerian/ lembaga yang berwenang dan industri dalam menyusun kurikulum tepat sasaran yang dapat memberikan nilai tambah bagi lulusan sekolah/pencari kerja dari segi keterampilan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Saat ini Kemenaker tengah menginisiasi program yang merangkul keterlibatan PMA dalam penyediaan pelatihan tenaga kerja. Inisiatif tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara factor supply and demand yang menyebabkan ketidaksinkronan ketersediaan pekerja dengan kebutuhan industri. Program ini merupakan

salah satu follow-up kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara Eropa pada bulan April 2016. Selain memberikan dukungan bagi pelaksanaan program tersebut, DPR RI sebaiknya melakukan pengawasan melalui AKD terkait guna menjamin manfaat seluas-luasnya bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Selanjutnya dapat dipertimbangkan ketersediaan legislasi sebagai upaya pengaturan kerja sama antara pemerintah, pihak swasta dan lembaga pendidikan dalam melakukan program pendidikan vokasi dan permagangan. Selain memberikan landasan bagi pengaturan teknis, legislasi dapat juga mengatur mengenai pelibatan masing-masing pihak dalam memberikan saran rekomendasi bagi penyusunan kurikulum pendidikan vokasi.

Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jerman. *Vocational Training Act* 1969 yang di amandemen pada tahun 2005 menjadi payung bagi kerja sama yang erat antara Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian (*Länder*), dan perusahaan swasta dalam memberikan pelatihan bagi pemuda angkatan kerja untuk bidang-bidang yang mendapatkan pengakuan secara nasional melalui sertifikasi yang diterbitkan lembaga yang berkompeten, dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (*Industrie-und Handelskammer - IHK*) dan Kamar Pertukangan (*Handwerkskammern*).

## B. Rekomendasi Umum bagi Upaya Peningkatan Kapasitas Dalam Negeri di Era Persaingan Ekonomi Kawasan

Peningkatan daya saing sumber daya manusia tidak terlepas dari penciptaan lingkungan yang mendukung upaya-upaya tersebut. Melalui pengamatan lapangan di daerah-daerah terdepan Indonesia, Panja menemukan bahwa akses masih menjadi tantangan tersendiri bagi warga di perbatasan. Selanjutnya, kapasitas SDM tentunya tidak terpisahkan dari kapasitas intelektual SDM tersebut. Sehingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual terutama bagi UMKM menjadi suatu kebutuhan.

### 1. MEMPERTIMBANGKAN PERLUASAN STATUS FTZ DI DAERAH PERBATASAN

Dalam kunjungan ke pulau-pulau terdepan NKRI, BKSAP mendapati adanya kesenjangan kondisi kehidupan antara pulau-pulau terdepan Indonesia dengan negara tetangga. Terutama kondisi warga Kepulauan Meranti. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses warga setempat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang terjangkau. Dengan luas wilayah daratan mencapai 3598,02 km persegi dan luas wilayah lautan mencapai 3224,79 km persegi serta populasi penduduk mencapai 240 ribu jiwa, saat ini tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti mencapai 32 persen. Dalam skala nasional, Meranti termasuk dalam 10 kabupaten termiskin di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di salah satu pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini, terhambat oleh minimnya sarana logistik lintas kota dan lintas provinsi. Mengingat sistem otonomi daerah sudah diimplementasikan, aspirasi masyarakat setempat agar Kepulauan Meranti memiliki status *Free Trade Zone* perlu dipertimbangkan. Dengan status FTZ, warga setempat akan memiliki lebih banyak kemudahan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok. Secara umum, daerah-daerah perbatasan dan daerah yang sudah memiliki konektivitas internasional perlu diberikan prioritas terkait MEA.

### 2. MELAKUKAN SOSIALISASI HAKI

Dalam konteks liberalisasi perdagangan regional, masih ada kekhawatiran masyarakat mengenai prosedur dan biaya pendaftaran hak paten. Seiring dengan diimplementasikannya MEA, produk asal Indonesia harus terdaftar di seluruh negara ASEAN. Hal ini juga berlaku untuk produk yang diproduksi

oleh sektor UKM. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Perda yang mengatur prosedur dan pembiayaan pendaftaran hak paten. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya kepada para pelaku usaha.

Sebagai anggota badan perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO), Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Ketentuan tersebut diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pada tahun 2016, DPR RI telah mengesahkan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai revisi UU No. 14 Tahun 2001. Disahkannya UU yang baru telah menjembatani kebutuhan penyelenggaraan paten di Indonesia antara lain mengenai ketentuan teknis yang meliputi e-filing, pemberian insentif, proses pemeriksaan dan cara pembayaran pemeliharaan paten.

UU yang baru mengatur bahwa pemeriksaan paten dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang direkrut dari luar Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual antara lain dari pihak universitas atau lembaga penelitian yang memiliki kapasitas keilmuan yang sesuai. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran paten. Selanjutnya, UU yang baru memberikan jaminan perlindungan hukum bagi UMKM. UMKM dapat langsung menjadi pemegang paten pada setiap produk paten yang dihasilkan. UU ini mengatur pula mengenai royalti atas produk paten sehingga dapat menjadi stimulus bagi inventor lokal untuk mematenkan produknya.

Selain UU mengenai paten, saat ini Indonesia telah memiliki perangkat legislasi di bidang hak kekayaan intelektual yang memadai. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta maupun hak ekonomi pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Selain itu telah terdapat UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Industri dan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu, DPR RI telah mengesahkan UU Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 27 Oktober 2016 yang tidak hanya mengatur merek konvensional namun juga merek non-tradisional.

### 3. MEMBERIKAN PERHATIAN PADA PENGEMBANGAN DIGITAL EKONOMI

am menghadapi perkembangan teknologi informasi. Cetak Biru MEA 2015–2025 telah menggarisbawahi bahwa dalam satu dekade setelah implementasi MEA di tahun 2015, ASEAN masih akan tetap memberikan penekanan pada pembangunan sektor UMKM. Sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru tersebut, ASEAN menyadari kebutuhan untuk merangkul perkembangan teknologi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, memperkuat fondasi pengembangan e-bisnis, mempromosikan tata kelola, dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi hijau.

ASEAN menyadari menguatnya posisi *e-commerce* sebagai bagian dari strategi pemasaran multi-channel beberapa tahun terakhir ini harus dicermati sebagai isyarat untuk mengembangkan unsur strategi vital tersebut. *E-commerce* tidak hanya berperan dalam transaksi perdagangan lintas batas, namun berperan signifikan dalam rantai supply regional dengan mengurangi hambatan perdagangan (*barriers to entry*) dan biaya operasional secara signifikan sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM yang memiliki kapital dan sumber daya terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM sejalan pula dengan tujuan implementasi MEA terutama pilar ke-empat yaitu kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Oleh karena itu, selayaknya Indonesia mulai memberikan fokus lebih banyak pada perkembangan digital ekonomi yang mendukung di dalam negeri.

Saat ini Pemerintah RI tengah menargetkan visi negara digital terbesar di ASEAN tahun 2020. Untuk mewujudkan visi itu beberapa strategi yang telah diadopsi Pemerintah Indonesia meliputi penyiapan peta jalan (*roadmap*) *e-commerce* nasional serta mempermudah lisensi bisnis bagi para pelaku *e-commerce*. Kepastian hukum mengenai *e-commerce* di dalam negeri telah diatur dalam UU No. 7/2014 tentang Perdagangan. Pasal 65 dan 66 pada Bab VIII UU tersebut telah secara jelas mengatur mengenai perdagangan system elektronik dan mengamatkan kewajiban pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan data mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kebijakan pengenaan pajak *e-commerce* saat ini mengacu ke Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-62/PJ/2013 mengenai penegasan

ketentuan perpajakan *e-commerce*. Pemberlakuan MEA sejak Desember 2015 membawa tantangan dengan membanjirnya produk-produk *online* negara anggota ASEAN namun di sisi lain membawa peluang bagi penetrasi produk Indonesia di pasar *online* Asia Tenggara. Dalam hal ini diharapkan ketidakpahaman mengenai ketentuan yang berlaku di dalam negeri tidak menjadi penghalang bagi pelaku bisnis *online* di Indonesia untuk menysasar pasar Asia Tenggara. Guna menyasati hal tersebut, tentunya diperlukan sosialisasi mendalam mengenai ketentuan-ketentuan perdagangan dan perpajakan terkait *e-commerce* tersebut.

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran utama pelaku *e-commerce* adalah mengenai jaminan perlindungan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam proses transaksi perbankan elektronik. Di lingkup nasional, perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pranata legislasi tersebut belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini patut dipertimbangkan untuk menyediakan payung hukum atau kebijakan yang tidak saja memberikan kepastian hukum namun secara spesifik menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, dan memberikan solusi apabila terjadi dispute.

Di tataran ASEAN, BKSAP DPR RI menyadari perbedaan tingkat infrastruktur digital antara negara-negara anggota ASEAN menjadi tantangan tersendiri. Awareness akan hal tersebut telah disampaikan dalam berbagai forum, baik dalam kesempatan *interface* dengan pemimpin negara-negara ASEAN di sela-sela ASEAN Summit maupun melalui resolusi-resolusi di Sidang Tahunan AIPA. Di dalam negeri sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memasukkan upaya menjembatani digital divide ke dalam Rencana Strategis 2015-2019. Hal ini merupakan pula upaya untuk streamlining kerja Kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang merupakan penjabaran visi misi agenda Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

...the ...

